



SUATU DUNIA
PERPUSTAKAAN KAMPUS UTARA DAN PERPUSTAKAAN KAMPUS BARU
PERIODE TAHUN 1994-1996



PERPUSTAKAAN POSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	10 - 1 - 97
Asal dari	Fak: Ekonomi
Fungsinya	1 ekp.
Harga	Gratis
No. Inventaris	9716 01 004
No. Klas	-

Oleh

ASWALUDDIN

91 01 135

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1996



SUATU TINJAUAN TENTANG
PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
PERIODE TAHUN 1990 - 1995

OLEH:
A S W A L U D D I N
91 01 135

SKRIPSI DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI
SEBAHAGIAN SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI
PADA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

DISETUJUI PEMBIMBING :

(DRS. ROBERT A. WATTIMENA)
Pembimbing I

(DRA. NURSINI, MA.)
Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT., karena atas Hidayah dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, meskipun dalam bentuk sederhana di dadalm membahas tentang perekonomian Indonesia serta ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Sesuai dengan tujuan penulis yang merupakan judul skripsi ini "Suatu tinjauan tentang pinjaman luar negeri dan perekonomian Indonesia periode 1990-1995" yang ditulis untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati yang tulus ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Karim Saleh, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Bapak A. Kahar Akil, SE, MS., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unhas.

Khusus penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya buat ;

- Bapak Drs. R. A. Wattimena, selaku pembimbing I.
- Ibu Dra. Nursini, MA., selaku pembimbing II.
- Bapak Drs. Hidayat Ely, selaku dosen dan sahabat.

Juga kepada sahabat-sahabatku ; M. Arsyad, SS., Muh. Syahrir, SS., Amirsyah, SS., Muh. Kahar, S.Sos., Sudirman, S.Sos., dan tak lupa adikku yang termanja : Susi Armaliya, Herlina Mustafa, serta Andi Herlina, yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan di dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Akhirnya sembah sujud ananda kepada Ayahanda M. Aris, Ayahanda H. Muh. Amin Ds, dan Ibunda A. Nurfatiha, yang dengan cucuran keringan serta do'anya, telah menimang dan menempe penulis dalam suka dan duka hidupnya yang tidak pernah merasa putus harapan.

Kepada saudara-saudaraku, keluargaku serta rekan-rekanku yang tersayang, dengan segala pengorbanan/pengertiannya dan iringan do'anya sehingga penulis skripsi sederhana ini dapat selesai dengan penuh suka dan duka.

Semoga semua person yang memberikan bantuan/pertolongannya kepada penulis diberkati Allah Subhahana Wataala serta melimpahkan Karunia dan HidayahNya dan memberkati kita semua, Amin !!!

Tamalanrea, Desember 1996

PENULIS

ABSTRAK

Indonesia, di antara negara-negara yang sedang berkembang, tercatat sebagai salah satu negara yang sangat pesat dalam pertumbuhan ekonominya. Pada kenyataannya, dalam tahapan pembangunan ke enam sekarang ini, dilihat dari segi pendapatan perkapita, Indonesia telah beranjak dari kategori negara yang berpendapatan rendah menjadi negara yang berpendapatan menengah.

Pertumbuhan ekonomi yang maju dengan pesat itu, sebagian besar didasarkan atas keyakinan akan kemampuan Indonesia mengatasi akibat dari resesi dunia yang mempengaruhi situasi perekonomian dalam negeri, dengan mengandalkan pada sumber-sumber kekayaan alamnya. Walaupun demikian Indonesia tidak akan bisa mengelakkan akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dewasa ini, terutama yang menyangkut masalah perdagangan luar negeri.

Pada tahun 1990/1991 hingga tahun-tahun akhir ini (tahun 1996/1997), perekonomian Indonesia diwarnai oleh semakin kuatnya permintaan domestik, terutama investasi dan konsumsi sektor swasta. Tingginya peningkatan permintaan domestik tersebut bahkan tidak dapat diimbangi sepenuhnya oleh penawaran domestik sehingga menimbulkan tekanan-tekanan terhadap keseimbangan internal dan eksternal.



Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tersebut mendorong kenaikan harga sehingga menyebabkan laju inflasi masih relatif tinggi. Disisi eksternal, ketidakseimbangan tersebut mendorong peningkatan impor. Perkembangan tersebut, yang disertai pertumbuhan ekspor yang melambat, mengakibatkan sektor luar negeri menjadi faktor pengurangan dalam pembentukan PDB.

Dengan keadaan perekonomian seperti yang digambarkan di atas, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pinjaman luar negeri. Karena bagaimanapun juga peningkatan pembangunan bagi suatu negara, akan memerlukan dana yang besar, tetapi tidak sampai menjadi ketergantungan, karena keterlanaan kita akan arus dana yang berdatangan dari negara-negara maju.

Oleh karena itu, diperlukanlah terobosan-terobosan baru untuk menambah sumber penerimaan dalam negeri, agar tabungan pemerintah turut bertambah, sehingga mampu membiayai pembangunan ekonomi dalam negeri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Pokok	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Kerangka Konseptual	5
2.2 Jenis dan Sumber Data	6
2.3 Metode Penulisan	7
2.4 Model Analisis	7
2.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB III LANDASAN TEORI	9
3.1 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Indonesia	9
3.2 Perekonomian Dalam Negeri Indonesia	21
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Posisi Pinjaman Luar Negeri Indonesia	29
4.2 Keadaan Ekspor Indonesia	41
4.3 Pinjaman Luar Negeri dan Perekonomian Indonesia	53

BAB V P E N U T U P	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel:

Hal:

I	POSISI BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH (1990-1995/96)	31
II	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN 1990/91 - 1995/96	34
III	PELUNASAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH TAHUN 1990 - 1995/96	37
IV	PERSETUJUAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH TAHUN 1990/91 - 1995/96	39
V	VOLUME, NILAI EKSPOR NON MIGAS DAN PERANAN- NYA TERHADAP TOTAL NILAI EKSPOR INDONESIA	43
VI	VOLUME, NILAI EKSPOR MIGAS DAN PERANANNYA TERHADAP TOTAL NILAI EKSPOR INDONESIA	43
VII	PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 1990 - 1995/96	46
VIII	TABUNGAN PEMERINTAH DAN KEADAAN EKSPOR INDONESIA TAHUN 1990 - 1995/96	52
IX	PELUNASAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH TAHUN 1990 -1995/96	55
X	POSISI TABUNGAN PEMERINTAH DAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN DALAM TAHUN 1990 - 1995/96	59
XI	POSISI TABUNGAN PEMERINTAH, PELUNASAN PIN- JAMAN LUAR NEGERI DAN NILAI EKSPOR, TAHUN 1990 - 1995	62
XII	POSISI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN TABUNGAN PE- MERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, TAHUN 1990 - 1995	64

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Walaupun perekonomian sedang dilanda resesi serta guncangan sosial politik lainnya, kelompok negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pada tahun 1990 mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena keterbukaan sektor luar negeri yang merupakan suatu kesempatan yang cukup baik untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri Indonesia. Peranan sektor luar negeri merupakan sektor yang paling banyak mempengaruhi maju mundurnya perekonomian Indonesia.

Pinjaman/hutang luar negeri Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar dan merupakan beban bagi bangsa Indonesia terutama dikaitkan dengan kewajiban pengembalian/pembayaran suku bunganya. Dengan melalui pembayaran cicilan hutang luar negeri Indonesia plus bunganya yang juga turut meningkat sehingga menjadi beban anggaran rutin yang besar. Sebagai konsekuensinya, kemampuan penyediaan dan untuk keperluan biaya rutin maupun pada tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan menjadi sangat terbatas.

Dalam hubungan dengan bantuan luar negeri ini, **Todaro** antara lain mengatakan :

"Bantuan luar negeri itu tidaklah meningkatkan

pertumbuhan lebih cepat, akan tetapi dalam kenyataan malah memperlambat pertumbuhan dengan lebih banyak mengadakan substitusi dari pada melengkapi tabungan dan investasi dalam negeri, serta dengan memperbanyak defisit neraca pembayaran bagi negara-negara dunia ketiga sebagai akibat meningkatnya obligasi pembayaran kembali hutang-hutang dan bantuan yang meningkat bagi ekspor-ekspor negara donor ...,"¹

Dengan kenyataan mengenai bantuan luar negeri untuk negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia seperti dikemukakan di atas maka menarik perhatian penulis untuk memilih judul ; "Suatu Tinjauan Tentang Pinjaman Luar Negeri dan Perekonomian Indonesia periode Tahun 1990-1995".

Dalam pada itu Sadono secara tidak langsung memberikan alternatif bagi negara-negara berkembang, dengan mengemukakan bahwa ;

"Rendahnya tingkat tabungan dan pendapatan menimbulkan masalah yang serius di negara-negara berkembang. Disatu pihak, usaha mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal yang besar sekali. Akan tetapi dilain pihak, kemampuan negara-negara tersebut untuk menyediakan dana modal untuk keperluan mempercepat pemba-

¹) Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (2). February 1983, hal. 147.

ngunan itu terbatas. Oleh sebab itu, sebagai salah satu aspek dalam kebijaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang perlulah dilakukan usaha-usaha untuk memperoleh lebih banyak dana pembangunan." ²

1.2 Masalah Pokok

Sektor luar negeri, dalam hal pinjaman luar negeri Indonesia dan jika diadakan penganalisaan maka disebutlah sebagai unsur penunjang anggaran pembangunan ekonomi nasional.

Pinjaman luar negeri, bila dilihat dari segi pembangunan ekonominya bagi negara penerima seperti Indonesia sangat penting peranannya sebagai mobilisator dalam menopang dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan melihat indikator dan unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan pinjaman luar negeri, misalnya; kebijaksanaan moneter perpajakan, ekspor migas dan non-migas, dan sebagainya.

Selain dari integritas pemerintah di dalam melaksanakan hal-hal di atas, maka nilai ekspor juga perlu mendapat perhatian besar agar dapat meningkat pada tahun-tahun akan datang. Seperti yang telah dikemukakan di atas maka penulis menarik suatu masalah pokok, sebagai berikut :

"Sejauhmana pinjaman luar negeri dalam menunjang perekonomian Indonesia."

²) Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, tahun 1978, hal. 350



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Studi mengenai penulisan ini bertujuan untuk menganalisa secara kualitatif beberapa aspek tentang pinjaman luar negeri, terhadap perekonomian Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui secara umum sejauhmana hubungan pinjaman luar negeri dalam menunjang perekonomian Indonesia.
- 1.3.2. Memberikan gambaran tentang pinjaman luar negeri Indonesia yang meningkat dan kaitannya terhadap prospek perekonomian dalam negeri.

BAB II

M E T O D O L O G I

2.1. Kerangka Konsepsional

Pinjaman luar negeri di luar dari hibah, merupakan substitusi dari pada tabungan untuk membiayai pembangunan ekonomi seperti membiayai realisasi proyek-proyek yang berstatus jangka panjang dan jangka pendek, yang keduanya merupakan penunjang pada pendapatan nasional.

Di dalam pembahasan ini juga mengarah kepada pinjaman luar negeri sebagai unsur penunjang perekonomian dalam negeri, dengan asumsi sementara bahwa pinjaman luar negeri merupakan substitusi terhadap tabungan dalam negeri / pemerintah, sehingga bila terjadi peningkatan pinjaman luar negeri setiap tahunnya maka semakin menunjang pula perekonomian Indonesia.

Tetapi di segi lain akan dikemukakan berapa besarnya jumlah tabungan dalam negeri/pemerintah setiap tahunnya. Begitu pula pinjaman luar negeri yang bersumber dana berasal dari badan-badan Internasional dan dikoordinir oleh sebuah lembaga yang diberi nama IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia), dan kemudian berubah nama menjadi CGI. Dimana kesemuanya merupakan sumber dana bantuan pinjaman luar negeri termasuk bantuan hibah. Meskipun demikian yang harus diperhitungkan adalah pengembaliannya, baik yang tergolong sebagai pembayaran angsuran maupun yang sudah menjadi beban bunga serta bunga berganda.

Dalam pembahasan ini pula, juga dikemukakan dua hal komponen penting yaitu ; Bantuan/pinjaman luar negeri dan tabungan dalam negeri/pemerintah. Tabungan pemerintah adalah merupakan selisih penerimaan pemerintah dengan pengeluaran rutin. Sedangkan bantuan luar negeri adalah merupakan sumber dana yang berasal dari luar negeri termasuk di dalamnya bantuan hibah.

Bantuan luar negeri dalam dua bentuk yakni bantuan proyek dan bantuan program. Yang termasuk kedalam bantuan proyek adalah bantuan berupa peralatan seperti mesin-mesin kecil sampai kepada yang berstandar raksasa, yang dipergunakan pada pelaksanaan proyek-proyek. Sedangkan yang masuk kedalam bantuan program adalah bantuan yang berupa pangan, non pangan seperti benang tenun dan kapas. Kedua bantuan tersebut dapat menciptakan nilai rupiah untuk dana pembangunan ekonomi, lagi pula menambah jumlah arus barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bantuan luar negeri dan tabungan pemerintah keduanya mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, untuk bersama-sama menunjang sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian dalam negeri.

Oleh karena itu di dalam pembahasan skripsi ini akan penulis tampilkan analisa deskriptif.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penulisan ini dipergunakan jenis data sekunder, yang bersumber dari macam terbitan dan tulisan ;

apakah dalam bentuk laporan, bulletin serta terbitan-terbitan lain yang resmi juga layak dipercaya untuk dipergunakan di dalam penulisan ini. Bahan tulisan ini dan terbitanyang dimaksud di atas berasal dari berbagai instansi, lembaga-lembaga resmi baik nasional maupun internasional.

2.3. Metode Penulisan

Agar dapat menguji data yang ada dalam penulisan ini maka kedua permasalahan utama akan dianalisa baik secara terpisah maupun secara umum, maka analisa ini menekankan pada analisa deskriptif dari berbagai hasil penelitian pustaka.

2.4. Model Analisa

Penulisan ini yang akan lebih menekankan pada analisa deskriptif dan dibantu dengan menggunakan data-data dalam penganalisaan masalah, dimana pinjaman luar negeri dikatakan sebagai penunjang jika dengan tingkat pertumbuhan tertentu dapat dicapai, dimana sumber dana dari pinjaman luar negeri lebih besar dari tabungan dalam negeri, atau pinjaman luar negeri itu merupakan substitusi terhadap tabungan dalam negeri.

Oleh karena itu bila terjadi kenaikan tabungan pemerintah setiap tahunnya maka pinjaman luar negeri dapat diperkecil atau dikurangi.



2.5. Sistematika Pembahasan

Di dalam pembahasan skripsi ini maka penulis memakai lima bab serta anak bab, juga dilengkapi oleh lampiran-lampiran dan daftar tabel serta daftar pustaka yang komposisinya sebagai berikut :

Bab pertama, meliputi bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penulisan.

Bab kedua, meliputi bab metodologi yang mengemukakan kerangka konseptual, jenis dan sumber data, metode penulisan, model analisa, dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga, membahas landasan teori yang relevan dan layak dengan permasalahan penulisan "Suatu tinjauan tentang pinjaman luar negeri dan perekonomian Indonesia periode tahun 1990 - 1995."

Bab keempat, pada bab ini akan ditampilkan pembahasan masalah dengan menggunakan analisa kualitatif diskriptif dan merupakan bab inti dari penulisan skripsi ini.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab penutup dan saran-saran serta dilengkapi dengan lampiran, daftar tabel yang terakhir daftar pustaka.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Bantuan Pinjaman Luar Negeri Indonesia

Sebelum melangkah lebih jauh tentang bantuan pinjaman luar negeri Indonesia, terlebih dahulu mengetahui konsep definisi bantuan pinjaman luar negeri secara umum yaitu ; Sebagai pemindahan segala sumber yang riil dari suatu negara ke negara lain atau dari negara donor (negara maju) ke negara penerima (negara berkembang). Todaro mengemukakan juga bentuk lain bantuan luar negeri yaitu ;

"Namun ada beberapa pemindahan sumber yang seharusnya masuk di dalam hitungan bantuan luar negeri, tetapi tidak di masukan seperti yang biasa disebut sebagai arus yang terselubung atau pemindahan modal secara implisit (*disguised flows*) dan arus komersial modal swasta."³

Bantuan pinjaman luar negeri ini adalah merupakan salah satu sumber dana yang penting dalam membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi bagi setiap negara penerima (negara berkembang).

Para ahli ekonomi telah menggariskan bahwa bantuan luar negeri memiliki dua kriteria yaitu ;

³Michael P. Todaro, Op Cit, hal. 130

- Tujuan bantuan pinjaman luar negeri merupakan non komersial, dari kaca mata negara donor.
- Bantuan pinjaman luar negeri tersebut disertai dengan persyaratan yang konvensional suku bunga dan waktu pelunasan kembali hutang-hutang pinjaman luar negeri, yang mana haruslah lebih lunak bila di bandingkan dengan persyaratan yang ada pada pinjaman komersial.

Dengan melihat di atas, maka pengertian yang dimaksud dengan bantuan luar negeri dan sudah berlalu bahkan diterima secara menyeluruh adalah, bantuan yang meliputi semua pinjaman konvensional dan bantuan pemerintah seperti dalam bentuk uang serta jasa, yang benar-benar di arahkan untuk memindahkan sumber-sumber yang datangnya dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang, tujuan dasarnya untuk membangun atau pemerataan pendapatan masyarakat.

Dilain pihak ada pendapat lain yang tidak menghendaki adanya bantuan/pinjaman luar negeri untuk negara penerima/negara berkembang, dengan dasar pemikiran agar supaya negara-negara berkembang sebagai penerima didalam melaksanakan pembangunan hendaknya lebih mengharapkan pada kemampuan nasionalnya sendiri, maksudnya dengan melalui kerja keras yang dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan tabungan dalam negeri bagi suatu negara berkembang termasuk Indonesia.

Seperti yang dikutip oleh Basri Hasanuddin, dalam bukunya ; "Bantuan Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Indonesia", bahwa negara-negara berkembang :

"Does better to stand on it's own feet, that acceptance of foreign aid is undignified and demoralizing."⁴

Bahwa dengan kemampuan nasional bagi negara-negara berkembang dapat memperbaiki kedudukan negaranya dengan menggunakan modal sendiri/dalam negeri.

Meskipun telah bermunculan pernyataan pro dan kontra mengenai perlu tidaknya bantuan pinjaman luar negeri untuk negara-negara berkembang, maka lebih jelasnya lagi Kindleberger mengemukakan bahwa :

"Borrowing abroad is needed to add to total resources possible by providing a limited range of resources which the country does not possess. Without loans, but with capacity to transform, a country could develop though at a slower rate because of the over all lack of resources. With virtually unlimited loans, but without capacity to transform economic development would be impossible. Foreign loans could be used to add to consumption, and possibly to increase productivity in existing lines to some degrees, but development as a process would be impossible."⁵

⁴Basri Hasanuddin, Bantuan Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Ujung Pandang, 1984, hal. 5

⁵Kindleberger, Economic Development, Third Edition, Tokyo 1965, hal. 343

Bantuan/pinjaman luar negeri tidak akan menunjang pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang jika realisasinya nanti tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruktif atau keperluan yang sifatnya produktif.

Pentingnya bantuan/pinjaman luar negeri bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia di dalam melaksanakan pembangunannya dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia tidak semata-mata mengandalkan/mengharapkan pada sumber dana dalam negerinya sendiri, dimana semuanya itu pula dengan adanya kenaikan arus modal dari negara-negara industri ke negara-negara berkembang.

Pengertian tentang arus modal menurut Todaro, adalah bahwa sebagai berikut :

"Arus sumber-sumber keuangan Internasional terjadi dalam dua bentuk yaitu ; Investasi swasta asing yang pada umumnya melalui perusahaan besar multinasional yang berkantor pusat di negara-negara maju dan bantuan pembangunan pemerintah (bantuan pemerintah asing untuk pembangunan) yang kedua-duanya berasal dari masing-masing pemerintah nasional dan perwakilan negara-negara donor."⁶

Sumber bantuan luar negeri berasal dari dua sumber yaitu Bilateral dan Multilateral. Yang dimaksud dengan bantuan

⁶Michael P. Todaro, Op. Cit., hal. 116

bilateral adalah bantuan langsung dari pemerintah negara industri ke negara berkembang. Sedangkan bantuan multilateral adalah bersumber dari Bank Pembangunan Dunia, badan-badan khusus PBB atau melalui lembaga-lembaganya. Seperti dijelaskan oleh Salvator D. dan Dowling E, bahwa :

"The are various types of foreign aid ; Bilateral (i.e. directly from the goverment of a developed nations to the goverment of a developing nations) versus multilateral (i.e. From an International ogranisation such as the world bank)."⁷

Untuk lebih jelasnya lagi maka diuraikan secara lengkap tentang bantuan / pinjaman luar negeri dari sumber-sumber multilateral yaitu : Bank Dunia (World Bank), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Assosiation (IDA), International Finance Coporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), The Carabian Development Bank (CDB), Inter - American Development Bank (IDB), The African Development Bank (AFDB).

Dan badan-badan / lembaga khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang termasuk bantuan multilateral yakni : United Nations Development Programe (UNDP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Food

⁷⁾Salvatore D. and Dowling E., Development Economic, MC Graw-Hill book company, 1977, hal. 120

Programme (WFP), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF), International Labour Organization (ILO), United Nations Educational, Scientific and Culture (UNESCO), The World Health Organization (WHO), The food and Agriculture Organization (FAO).

Untuk bantuan / pinjaman luar negeri Indonesia yang datangnya dari negara-negara maju/industri dikelola dan di koordinir langsung oleh Inter Government Group on Indonesia (IGGI) yang terbentuk pada tahun 1967 dan bubar pada tahun 1993, yang kemudian berubah nama dengan Consultative Group of Indonesia (CGI).

Bagaimanapun juga tumpuan harapan Indonesia untuk mendapatkan dana pinjaman dari luar negeri lebih condong datangnya dari atau melalui IGGI yang berubah nama menjadi CGI, beranggotakan sejak pada dekade tahun 60-an itu : Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Selandia Baru, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, Austria, Denmark, Italia, Norwegia, dan Swiss, dimana kesemua negara-negara ini saling meningkatkan bantuan / pinjamannya pada tahun-tahun berikutnya (dekade 80-an dan 90-an).

Dengan adanya kenaikan-kenaikan pada pinjaman luar negeri Indonesia maka kekhawatiran akan timbul akibat dari adanya pertambahan jumlah tersebut. Maka sifat ketergantungan pada sumber dana yang datangnya dari luar negeri semakin terlihat, dengan munculnya dilema ketergantungan, seperti yang dikemukakan oleh Presiden pertama Republik

Indonesia, ketika dibicarakan akan bahaya besarnya jumlah defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan besarnya dana bantuan pinjaman luar negeri yang dibutuhkan, maka beliau pernah menjawab dalam bahasa Belanda bahwa :

"Ik ken van de hele economie er de ballen van Maareen groot volk, werkt nou eenmaal, met grote getallen"⁸

(Saya tidak mengerti apa-apa tentang ekonomi. Tetapi suatu bangsa yang besar seperti bangsa ini (Indonesia) memang harus bekerja dengan angka-angka/jumlah yang besar.....)



Pengertian dari kutipan diatas yakni, adanya jumlah bantuan / pinjaman luar negeri Indonesia yang besar sehingga mempunyai makna, bahwa jumlah itu mempunyai arti relatif. Dilihat dari apa yang dinamakan sebagai kebutuhan riil dari suatu bangsa yang besar seperti Indonesia. Kembali Soeharsono Sagir memberikan pandangan yaitu :

"...Adanya bantuan / pinjaman luar negeri serta besar jumlahnya menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih serba tergantung. Maka dari itu ketergantungan ekonomi itulah yang haru segera ditangani, untuk menghilangkan serba ketergantungan itu bukan saja dengan mengusa-

⁸⁾ Soeharsono Sagir, Ekonomi Indonesia, Gagasan, Pikiran dan Polemik, Januari 1982, hal. 57

hakan pengolahan kekayaan alam dan bumi di tanah air kita sendiri, bukan saja mengadakan koreksi dan perimbangan baru dari komponen-komponen dalam gross domestik produk bukan saja dengan usaha meningkatkan nilai lebih serta efisiensi. Itu semua perlu, namun iapun harus mencakup perubahan sikap dan kebiasaan hidup seperti pakaian dan makan sehari-hari..."⁹

Untuk memenuhi kebutuhan riil seperti yang tertuang di atas, maka timbullah pertanyaan ; masih berapa banyak yang harus didatangkan dari luar negeri...?.

Oleh karena itu bila masih dipersoalkan masalah ketergantungan, maka kuncinya adalah ; meningkatkan tabungan dalam negeri serta meningkatkan pula kemampuan teknis.

Sedangkan untuk masalah bantuan/pinjaman luar negeri dan ketergantungan, bukanlah masalah yang diremehkan dan juga tidak perlu untuk dicemaskan pula, meskipun negara-negara donor/maju mempunyai hasrat yang besar untuk memberikan bantuan/pinjaman keuangan kepada negara-negara berkembang, Indonesia misalnya.

Untuk itu Higgins, mempunyai alasan yang relevan dengan ungkapan di atas yaitu :

"Why donor countries believe aid should be provided...? Moral obligation to help to poor the threat to national security entailed in

⁹ Soeharsono Sagir, I t i d, hal. 63

the widening gap between rich and poor nations the desire to win allies, and the possibilities of expanding world trade have all been cited as reasons for helping the undeveloped countries with their development programs."¹⁰

Selain dari pada itu, pada prinsip moral dan solidaritas kemanusiaan juga masih ada yang lain seperti efek sosial dan politis sebagai imbalan dari bantuan/pinjaman luar negeri bagi setiap negara-negara berkembang. Ini lebih di jelaskan oleh K. Gunadi, yaitu :

"...Pengembalian keputusan dalam negara pemberi bantuan dapat mengharapkan bahwa negara penerima bantuan / pinjaman pada umumnya bersikap lebih baik terhadap negara pemberi dan memberikan dukungan kepada kepentingan politik masing-masing negara, negara-negara pemberi bantuan/pinjaman dapat mengharapkan bahwa negara penerima bantuan itu bersedia memberikan keuntungan ekonomis kepada negara pemberi, contohnya, membeli lebih banyak barang yang dieksportnya, juga mereka mengharapkan tanda-tanda adanya pengaruh yang lebih baik pada penduduk negara penerima bantuan mungkin dalam bentuk

¹⁰Rudy Parlindungan Sitompul, The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Saving in Indonesian, (School of economic University of Philipines, April 1982, hal. 8, MA Thesis, Unpublished

sikap rasa terima kasih atau adanya perubahan pada penduduk penerima bantuan sebagai akibat uluran bantuan tersebut."¹¹



Oleh karena itu sewajarnya bantuan/pinjaman luar negeri betul-betul difungsikan sesuai dengan tujuannya untuk pembangunan ekonomi, bukan digunakan pada sesuatu yang tidak produktif serta memperkaya diri sendiri.

Bantuan / pinjaman luar negeri merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi oleh karena itu pemanfaatan modal haruslah betul-betul untuk kepentingan pembangunan nasional. Untuk itu perlulah dilihat kembali tentang lalu lintas modal, yang di ungkapkan Basri Hasanuddin bahwa ;

"Selama dekade 70-an, lalu lintas modal pemerintah yang bersifat bilateral terutama mengalir ke negara-negara berpenghasilan menengah, sedangkan lalu lintas modal pemerintah bersifat multilateral kebanyakan mengalir ke negara-negara yang berpenghasilan rendah."¹²

Lagi pula negara-negara maju/industri memiliki berbagai macam cara untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang, misalnya dengan cara memberikan bantuan/pinjaman sebagai modal, sedangkan permodalan dapat

¹¹ Gunadi K., Bantuan Luar Negeri, Prisma no. 4, April 1977, hal. 21

¹² Basri Hasanuddin, Dana Luar Negeri Dalam APBN, Prisma no. 5, Mei 1984, hal. 34

dimasukkan ke dalam bentuk :

- Pinjaman atau bantuan modal pemerintah yang meliputi pinjaman jangka panjang dan menengah, hibah dan pinjaman lunak, bantuan komoditi (misalnya PL 480) dan bantuan lunak;
- Penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara industri di negara-negara sedang berkembang (penanaman modal asing);
- Bantuan-bantuan lainnya yang disalurkan melalui badan-badan swasta maupun lembaga-lembaga perbankan Internasional.¹³

Ketiga jenis lalu-lintas modal tersebut bukan saja berbeda dalam bentuknya, tetapi juga berbeda dalam tujuannya maupun pengaruh ekonominya bagi negara-negara berkembang.

Negara-negara industri, sebagai negara donor sebaiknya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai pembangunan domestik negara berkembang sebagai negara penerima.

Begitupun terhadap Indonesia, dimana negara-negara donor mengharapkan agar pemerintah Indonesia sebagai penerima, dapat mengambil suatu kebijaksanaan baru bagi pengembangan ekonomi nasionalnya yang dominan mengarah kepada penyesuaian jangka panjang. Mengenai hal ini Indonesia akan terus mengamati untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada dan untuk pihak negara-negara donor mengharapkan adanya kebijaksanaan tersebut.

¹³⁾ Basri Hasanuddin, I b i d, hal. 33

Terlepas dari semua itu, Indonesia dengan bantuan pinjaman luar negerinya diharapkan dapat mengantisipasi lebih awal dengan melihat pada pengembangan ekonomi dunia, sehingga kemampuan membayar utang-hutang luar negeri dapat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Selain itu usaha optimalisasi pendayagunaan hutang-hutang luar negeri Indonesia yang diperoleh tetap di teruskan.

Hal-hal mengenai pembayaran kembali baik dengan cara mencicil, kesemuanya itu haruslah tetap dijaga agar supaya kepercayaan negara-negara industri/maju sebagai negara donor terhadap perkembangan perekonomian Indonesia dapat ditingkatkan sebagaimana diharapkan, khususnya bagi negara-negara yang tergabung dalam IGGI/CGI dengan memberikan pinjaman berjangka panjang serta bunga relatif rendah.

Oleh karena itu usaha untuk optimalisasi pendayagunaan hutang-hutang tersebut, maka diharapkan dapat teratasi dengan jalan meningkatkan efisiensi di segala bidang agar bantuan/pinjaman luar negeri dapat digunakan/difungsikan secara terarah. juga dirasakan manfaatnya semaksimal mungkin oleh masyarakat umum. Seperti dikatakan Todaro :

"...Semakin banyak bantuan yang berbentuk pemberian cuma-cuma dan pinjaman-pinjaman konvensional, semakin berkurang keterikatannya pada ekspor negara-negara donor."¹⁴

¹⁴Michael P. Todaro, op. Cit., hal.156



Selain dari pada pinjaman yang berjangka panjang serta bunga relatif rendah juga termasuk pinjaman lunak yang IGGI/CGI berikan kepada Indonesia. Dengan adanya pinjaman lunak ini maka pemerintah berharap akan membantu menurunkan "debt service ratio" (DSR) pada masa-masa akan datang. Selain dari usaha untuk menurunkan DSR itu maka tidak kalah pentingnya yaitu mengusahakan agar dapat terjadi peningkatan ekspor non migas.

3.2. Perekonomian Dalam Negeri Indonesia

Perekonomian Indonesia tergolong perekonomian terbuka, salah satu ciri khas perekonomian terbuka suatu negara adalah masuknya pasar luar negeri ke dalam proses perekonomian tersebut, karena pasar luar negeri ini mempunyai hubungan yang erat dengan pasar lainnya.

Terlepas dari pola perekonomian Indonesia dimana pembangunan dan keadaan ekonomi dalam negeri sejak pada pelita pertama hingga pelita lima, telah memberikan harapan yang cukup berarti bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan ini utamanya yang terjadi pada sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, dan sektor luar negeri. Lagi pula di dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi ada tiga sektor penting yaitu : sektor pertanian, pertambangan, dan sektor industri. Semua ini telah digariskan dalam GBHN sebagai berikut :

"Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri serta didukung

oleh kekuatan dan kemampuan pertanian tangguh. Dengan suatu prinsip bahwa pelita terdahulu sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat banyak serta menciptakan landasan bagi repelita selanjutnya."¹⁵

Selanjutnya Prijono, dkk, memberikan pemikirannya tentang perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu :

"langkah-langkah pemerintah disegi pengurangan liku-liku perizinan yang akan mempunyai dampak positif terhadap sektor produksi dan perdagangan. hal ini perlu dicatat dan diamati untuk kemudian ditarik suatu hasil pengamatan apakah betul ada "hambatan birokrasi" (bureaucratic trap) yang selama ini dianggap melanda kegiatan di sektor-sektor tersebut."¹⁶

Jelaslah bahwa perekonomian dalam negeri suatu negara harus ditunjang oleh peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam kondisi akhir-akhir ini ekonomi Indonesia masih dalam suasana pengetatan ikat pinggang, sebagai akibat resesi ekonomi dunia, dan pada kenyataannya nilai ekspor migas pada dekade sekarang ini semakin menurun sehing-

15) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 1993

16) Prijono Tjiptoherijanto, dkk, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Volume XXXII Nomor 2, Juni 1994, hal. 126

ga sudah tidak lagi terlalu diharapkan, tetapi untuk kelanjutan pembangunan ekonomi sekarang maka pemerintah lebih banyak mengarah pada sektor non migas seperti yang dikemukakan oleh Sadono bahwa :

"Pembangunan ekonomi hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan."¹⁷

Disamping sektor pertanian dan pertambangan maka secara tidak langsung pembangunan proyek industri juga memberikan sumbangan yang cukup berarti karena sektor ini merupakan simpul lain di dalam menegakkan perekonomian Indonesia. Seperti dengan adanya pembangunan proyek dasar yang mempunyai kaitan erat terhadap perkembangan aneka industri.

. Bila sektor ekspor non migas mengalami peningkatan maka pendapatan dalam negeri juga ikut bertambah artinya, penerimaan dalam negeri semakin besar seperti yang dikemukakan oleh Anwar Nasution bahwa :

"Berhasil tidaknya usaha peningkatan penerimaan negara tersebut setidaknya tergantung pada empat hal pokok yaitu ; 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan undang-undang pajak dan kesadaran untuk membayar pajak; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aparat peme-

17) Sadono Sukirni, Op. Cit., hal. 105

rintah pada masyarakat; 3. Peningkatan kemampuan aparat perpajakan untuk memungut pajak, dan 4. Perbaikan sistem pembukuan perorangan dan badan usaha."¹⁸

Apa yang dijelaskan di atas, ketiga point tersebut mempunyai mekanisme tersendiri. Dan bila penerimaan negara bertambah maka tabungan pemerintah turut berpengaruh kenai-kannya, dan realisasi pembangunan dapat diharapkan.

Sedang tabungan terdiri dari: personal saving, tabungan perusahaan, dan tabungan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, Winardi telah memberikan batasan tentang tabungan yaitu sebagai berikut :

"Bagi seorang subyek - maka tabungan adalah sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsinya."¹⁹

Adanya usaha untuk meningkatkan tabungan dalam negeri/pemerintah merupakan salah satu kebijaksanaan untuk mempercepat proses pembangunan. Dalam artian bahwa manakala ingin mencapai hal yang demikian, maka tingkat pertumbuhan penerimaan pemerintah meningkat lebih cepat dibanding dari pada tingkat pengeluaran pemerintah.

Ada dua hal yang penting di dalam pengeluaran pemer-

¹⁸⁾ Anwar Nasution, Aspek Ekonomi Anggaran Belanja Negara, Prisma, hal. 26

¹⁹⁾ Winardi, Asas-asas Ekonomi Modern, hal. 13

intah yaitu ; pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin. Adapun penguraian kedua pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut :

Pengeluaran Pembangunan :

1. Pembiayaan Departemen/Lembaga ; departemen/lembaga, Hankam.
2. Pembiayaan Bagi Daerah; bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan kabupaten, bantuan pembangunan dati I, bantuan sekolah dasar, sarana kesehatan/puskesmas, bantuan pembangunan dan pemugaran pasar, bantuan penghijauan dan reboisasi, prasarana jalan, pembangunan Timortimur, dan Ipeda.
3. Pembiayaan Lain-lain ; subsidi pupuk, penyertaan modal pemerintah, dan lain-lain.

Pengeluaran Rutin :

1. Belanja Pegawai; tunjangan beras, gaji dan pensiun, biaya makan (lauk-pauk), belanja pegawai dalam negeri, dan belanja pegawai luar negeri.
2. Belanja Barang ; belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri.
3. Subsidi Daerah Otonom ; belanja pegawai, non belanja pegawai.
4. Bunga dan Cicilan Hutang ; dalam negeri dan luar negeri.
5. Lain-lain ; subsidi BBM dan lain-lain.

Diantara kedua kedua pengeluaran pemerintah di atas maka pengeluaran rutin masih lebih besar jumlah pengelua-

rannya, terutama point empat 'bunga dan cicilan hutang', khususnya hutang luar negeri.

Untuk dapat mengimbangi hal tersebut di atas maka perlu diketahui bahwa pemerintah memiliki beberapa cara di dalam usaha meningkatkan tabungan dalam negerinya, termasuk yang cukup mempengaruhi usaha tersebut adalah sektor "pajak" dengan melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan serta peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan perpajakan.

Dengan jalan memberikan kelonggaran-kelonggaran di dalam hal pembayaran wajib pajak, khususnya bagi para pengusaha/swasta yang memperoleh pendapatan yang cukup besar sehingga sumbangannya pada sektor pajak cukup berarti, tetapi dilain pihak ada hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pengusaha tersebut. seperti yang dikemukakan oleh Sadono, bahwa :

- "1. Memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam kewajiban untuk membayar pajak pendapatan perusahaan, seperti memberikan pembebasan sementara pajak pendapatan.
2. Tidak mengenakan pajak atas keuntungan yang ditanamkan kembali.
3. Memperkenankan hal-hal yang mempercepat depresiasi modal."²⁰

²⁰Sadono Sukirno, Op. Cit., hal. 359-360

Dengan demikian pemerintah dapat menaikkan penerimaan dalam negerinya dengan melalui perpajakan yang sekaligus memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pembangunan.

Adapun sumber penerimaan dari pajak, ada dua yaitu : pajak langsung dan pajak tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dari pada pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya; pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB). Sedang yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan pada orang lain/konsumen, misalnya; pajak pertambahan nilai (PPN), PKP (pengusaha kena pajak), dan non PKP (pengusaha tidak kena pajak).

Selain dari pajak sebagai salah satu dari sumber penerimaan, masih banyak yang menjadi sumber penerimaan pemerintah untuk menambah tabungan dalam negerinya seperti : penerimaan non tax merupakan pungutan yang diselenggarakan oleh departemen-departemen teknis seperti royalti, retribusi, ongkos nikah, talak dan rujuk, serta setoran-setoran laba oleh badan-badan usaha milik negara.

Oleh karena itu, sumber penerimaan dari sektor pajak dimana merupakan penerimaan yang dapat memperbesar tabungan dalam negeri/pemerintah, dan mengenal berhasil atau tidaknya, semua tergantung dari kesadaran masyarakat, serta mendapat bantuan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh pihak petugas pajak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Anwar Nasution tentang hal tersebut.

Meskipun penerimaan dalam negeri semakin bertambah tetapi dilain pihak pengeluaran pemerintah juga ikut bertambah. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang besar jumlahnya adalah pengeluaran "rutin", seperti belanja pegawai, menyusul belanja barang serta pelunasan bunga cicilan hutang pemerintah/luar negeri dan dalam negeri yang juga merupakan pengeluaran terbesar jumlahnya dalam pembiayaan pengeluaran rutin.

Serangkaian dengan itu, di dalam mengatasi hal-hal tersebut di atas maka pemerintah bertindak dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan/peraturan diberbagai sektor ekspor/import, dan sektor perpajakan, karena kedua sektor inilah yang dapat mengatasi sumber penerimaan dalam negeri agar terjadi kenaikan tabungan dalam negeri/pemerintah. Dengan digalakkannya ekspor non migas maka secara tidak langsung akan diperlakukan berbagai kebijaksanaan/peraturan yang diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor.

Dengan adanya upaya terobosan-terobosan di dalam peningkatan tabungan pemerintah, utamanya terobosan di sektor ekspor (migas dan non migas) sebagai salah satu sumber penerimaan yang utama bagi penerimaan pemerintah.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN



4.1. Posisi Pinjaman Luar Negeri

Dengan adanya kenaikan suku bunga Internasional, maka secara tidak langsung turut mempengaruhi beban pengeluaran rutin untuk bunga dan cicilan pemerintah terhadap pinjaman luar negerinya. Oleh karena itu pinjaman luar negeri akan dapat menimbulkan kesulitan bagi pembangunan ekonomi, apabila tidak dipergunakan atau difungsikan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih memperjelas gambaran tentang posisi pinjaman/hutang luar negeri Indonesia dapat dilihat dari ; beban cicilan pinjaman/hutang luar negeri Indonesia dengan memakai ukuran Ratio antara cicilan yang harus dibayar dengan hasil Netto ekspor. Dengan melihat Debt Service Ratio (DSR) Indonesia, seperti ; bila terjadi peningkatan atas DSR (Debt Service Ratio) maka ini merupakan suatu isyarat akan beratnya beban cicilan pinjaman / hutang luar negeri Indonesia serta memperlihatkan sampai sejauh mana tingkat keamanannya dapat terjamin. Batas maksimum DSR suatu negara adalah 20%, barulah dikatakan aman angsuran cicilan pinjaman/hutang luar negeri serta bunganya apabila tidak melewati batas maksimum tersebut.

Jika ditinjau kembali beban hutang/pinjaman luar negeri Indonesia, yang merupakan bantuan luar negeri pemerintah pada Pelita I, berkisar 708,6 milyar rupiah, dengan

perinciannya adalah ; bantuan proyek 268,2 milyar rupiah dan bantuan program 420,4 milyar rupiah. Sedangkan untuk masa periode Pelita II berkisar 3.316,3 milyar rupiah, dengan perinciannya, bantuan proyek 3.168,8 milyar rupiah dan bantuan program 150,5 milyar rupiah. Selanjutnya untuk masa periode Pelita III dan IV, dimana Pelita III terjadi perkembangan dengan jumlah totalnya 10.406,3 milyar rupiah, dengan perinciannya ; bantuan proyek 10.212 milyar rupiah dan untuk bantuan program 194,1 milyar rupiah. Pada Pelita IV dimana bantuan pinjaman luar negeri pemerintah berjumlah 10.623 milyar rupiah dengan perinciannya ; bantuan proyek 10.415,3 milyar rupiah dan untuk bantuan program 207,7 milyar rupiah. Untuk Pelita V bantuan pinjaman luar negeri adalah berkisar 52.385 milyar rupiah dengan perinciannya ; bantuan proyek 48.472 milyar rupiah dan untuk bantuan program berkisar 3.913 milyar rupiah. Untuk Pelita VI sebagai Pelita yang berjalan, dimana bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah untuk sementara berjumlah 11.170 milyar rupiah. Dengan perinciannya ; bantuan proyek berjumlah 11.170 milyar rupiah, untuk bantuan program tidak ada, karena negara-negara pemberi bantuan / pinjaman menganggap pemberian bantuan untuk pendanaan proyek lebih efektif dan lebih nyata/realistis.

Dengan melihat jumlah bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah setiap Pelita, terjadi peningkatan yang cukup besar. Dan untuk lebih jelasnya lagi, maka penulis akan memperlihatkan posisi bantuan/pinjaman luar negeri peme-

rintah setiap tahunnya dengan menggunakan tabel berikut :

TABEL I

Posisi Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Dan
Pengeluaran Pemerintah (1990 - 1995/96)
(dalam milyar rupiah)

: Tahun / : Semester :	: Bantuan/Pinjaman : Luar Negeri :	: Pengeluaran Pemerintah :	
		: Rutin :	: Pembangunan :
: 1990/91 :	: 9.905 :	: 29.998 :	: 19.452 :
: 1991/92 :	: 10.409 :	: 30.228 :	: 21.764 :
: 1992/93 :	: 10.716 :	: 34.031 :	: 24.135 :
: 1993/94 :	: 10.372 :	: 38.799 :	: 25.661 :
: 1994/95 :	: 10.983 :	: 43.179 :	: 29.163 :
: 1995/96 :	: 11.170 :	: 52.541 :	: 29.812 :
: :	: :	: :	: :

Sumber: Bank Indonesia ; Laporan tahunan pembukuan,
Departemen Keuangan ; Indikator Ekonomi,
September, 1996.

Didalam tabel I telah terlihat besarnya jumlah bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah bila dibandingkan dengan besarnya jumlah pengeluaran pemerintah. Dilain pihak terlihat kemunduran/penurunan jumlah bantuan luar negeri pada tahun 1993/1994 dengan jumlah totalnya 10.372 milyar rupiah, sedangkan pada tahun sebelumnya (1992/1993) memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 10.716 milyar rupiah. Sedangkan untuk tahun 1994/1995 bantuan/pinjaman luar negeri naik kembali menjadi 10.983 milyar rupiah. Juga pada tahun 1995/1996, bantuan/pinjaman luar negeri naik menjadi 11.170 milyar rupiah.

Jadi selama periode penulisan ini terjadi satu kali penurunan jumlah bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah

yaitu ; pada tahun ke empat Pelita V telah terjadi pengurangan sekitar 344 milyar rupiah.

Meskipun demikian pengeluaran pemerintah tetap bertambah. Utamanya pada pengeluaran rutin. Maka didalam kehadiran bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah, Berarti mempengaruhi biaya rutin lainnya. Dan logis karena biaya untuk pembiayaan rutin lebih banyak diserap oleh pelunasan bunga cicilan hutang luar negeri. Didalam tabel I terlihat bahwa pada tahun 1990/1991 bantuan luar negeri masih sebesar 9.905 milyar rupiah, serta pada tahun 1992/1993 meningkat menjadi 10.409 milyar rupiah. Selanjutnya terjadi peningkatan yang berlangsung terus-menerus sehingga mencapai jumlah yang terbilang tinggi yaitu ; sebesar 11.170 milyar rupiah pada tahun 1995/1996.

Sedangkan untuk pengeluaran rutin pemerintah yang paling besar yaitu ; berjumlah 52.541 milyar rupiah (1995/96). Dan besar kemungkinan jumlah bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah pada tahun 1996/1997 akan bertambah. Di lain pihak untuk pengeluaran pembangunan pemerintah jumlah yang berada pada tingkat teratas yaitu ; sebesar 29.812 milyar rupiah (1995/1996) yang merupakan kenaikan dengan tahun yang sama pada pengeluaran rutin pemerintah yang jumlahnya lebih besar yakni ; 52.541 milyar rupiah.

Kedua pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) terjadi kenaikan pada setiap tahunnya. Pada Pelita V dan bahkan diramalkan pada Pelita akan datang jumlahnya semakin bertambah karena adanya pengaruh kemajuan teknologi.

Pada dekade tahun 1990-an, pemasukan pinjaman luar

negeri pemerintah (bersih) mengalami penurunan yang cukup tajam, penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya penarikan pinjaman disatu sisi dan meningkatnya pembayaran angsuran pokok pinjaman disisi lain. Penarikan pinjaman menunjukkan penurunan yang terutama disebabkan oleh turunnya realisasi penarikan pinjaman proyek yang berasal dari anggota IGGI/CGI dan penarikan pinjaman khusus yang bersyarat lunak.

Pada tabel II akan diperlihatkan kembali berfluktuasinya bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah, dimana peningkatan yang merupakan rangking teratas, adalah ; 59,7% (1995/96) dan disusul diatasnya pada 1992/93 yakni; 34,9%, pada dasarnya terjadi peningkatan ditahun 1992/93 dan tahun 1995/1996 disebabkan oleh adanya kecenderungan harga minyak stabil (membaik), disamping peningkatan ekspor non migas juga meningkat drastis, sehingga pemerintah merasa optimis mampu membayar bunga/cicilan pinjaman luar negeri tersebut.

TABEL II

Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
Tahun 1990/91 - 1995/96
(dalam milyar rupiah)

Tahun/ Anggaran	Bantuan		Jumlah	Kenaikan	
	Program	Proyek		Total	%
1990/91	1.397	8.508	9.905	-	-
1991/92	1.563	8.846	10.409	+ 504	+ 20,6
1992/93	512	10.204	10.716	+ 307	+ 34,9
1993/94	441	9.931	10.372	- 344	- 30,1
1994/95	-	10.983	10.983	+ 611	+ 17,9
1995/96	-	11.170	11.170	+ 187	+ 59,7

Sumber : Nota Keuangan dan Biro Pusat Statistik,
September, 1996.

Dan yang mengalami penurunan sebesar -30,1% pada tahun 1993/94. Dengan adanya angka negatif ini, pada jumlah kenaikan yang terlihat pada tabel II, hal ini terjadi jumlah bantuan/pinjaman luar negeri pemerintah pada 1993/94 menurun dari pada periode sebelumnya tahun 1992/93.

Angka penurunan tersebut terjadi pada bantuan proyek yang sebesar 9.931 milyar rupiah (1993/94) yang menurun dari jumlah pada tahun 1992/1993 sebesar 10.204 milyar rupiah, dimana angka selisihnya adalah (-) 344 milyar rupiah dan apabila dihitung kedalam prosentase maka terlihat angka -30,1%. Untuk bantuan program terlihat mulai turun dari tahun 1992/93 sebesar 512 milyar rupiah. Tahun 1993/1994 turun menjadi 441 milyar rupiah. Dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.563 milyar rupiah (1991/1992). Dan pada tahun 1994/95 serta 1995/96 bantuan program tidak ada. Kare-

na Indonesia mampu membiayai sendiri program yang direncanakan sudah berhasil terlaksana dengan baik.

Sementara itu bila melihat Debt Service Ratio (DSR) pada tahun 1991/92 - 1992/93 terjadi penurunan, yaitu dari 20,6% menjadi 19,0%. Dimana penurunan tersebut merupakan perbandingan cukup besar terhadap beban pembayaran kembali pinjaman luar negeri pemerintah.

Untuk lebih jelasnya gambaran posisi hutang/pinjaman luar negeri pemerintah dapat dilihat dari keadaan "Debt Service Ratio" (DSR). Apabila DSR meningkat maka merupakan suatu isyarat akan beratnya beban hutang/pinjaman luar negeri bagi negara-negara penerima khususnya Indonesia. Demikian juga sebaliknya apabila DSR turun.

Dimana Indonesia pada langkah awalnya untuk menerima pinjaman luar negeri dimulai sejak tahun 1967. Dengan suatu persyaratan yang lunak, ataupun dalam bentuk sumbangan Hibah (grant) yang asalnya dari negara-negara donor/maju, serta lembaga-lembaga keuangan Internasional yang tergabung dalam Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berubah menjadi Consultative Group for Indonesia (CGI).

Pada Pelita sebelumnya pemerintah lebih banyak mengarahkan pinjaman kepada bentuk bantuan program yang terdiri dari bantuan pangan dan bantuan devisa kredit yang ditunjang oleh bantuan proyek. Tapi setelah Pelita ke V, maka pemerintah lebih banyak mengarahkan bentuk pinjamannya kedalam bentuk bantuan proyek pembangunan, karena pada Pelita tersebut pemerintah lebih mengarah kepada pem-



bangunan industri-industri menengah keatas. Dengan suatu persyaratan pinjaman yaitu ; bunga antara 0 - 3% setanun tenggang waktu 7 - 10 tahun dan jangka waktu pelunasannya antara 25 - 50 tahun.

Untuk mengadakan pinjaman luar negeri, maka pemerintah selayaknya berpegang pada kebijaksanaan pengendalian hutang-hutang dengan berpedoman pada perbandingan pelunasan angsuran dan pembayaran bunga pinjaman terhadap penghasilan devisa dari ekspor (migas dan non migas) dengan berkembang pada tingkat yang cukup aman agar dapat menciptakan kondisi stabil perekonomian secara keseluruhan.

Dalam tahun laporan Bank Indonesia, pembayaran angsuran pokok pinjaman pemerintah mengalami peningkatan pada tahun 1991/92 - 1992/93 dari 4,2 milyar US dollar menjadi 4,7 milyar US dollar. Sementara itu pembayaran bunga pinjaman juga meningkat, dari 2,6 milyar US dollar menjadi 2,7 milyar US dollar. Walaupun kewajiban pinjaman luar negeri pemerintah menunjukkan peningkatan, namun mengingat pertumbuhan ekspor khususnya ekspor non migas cukup tinggi, DSR pinjaman pemerintah mengalami penurunan dari 20,6% menjadi 19,0%.

Dengan perkembangan penarikan dan pelunasan angsuran pokok pinjaman pemerintah sebagaimana tersebut diatas, posisi pinjaman luar negeri pada tahun 1993 mencapai 48,9 milyar US dollar yang berarti lebih tinggi dari pada tahun 1992, yaitu sebesar 44,5 milyar US dollar.

TABEL III

Pelunasan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah
Tahun 1990 - 1995/1996
(dalam juta US dolar)

Tahun	Pelunasan Pinjaman (1)	Nilai Ekspor (2)	% dari nilai Ekspor
Repelita V			
1990/91	4.082	28.143	6,9
1991/92	4.182	29.714	7,1
1992/93	4.840	35.305	7,3
Repelita VI			
1993/94	5.132	36.504	7,1
1994/95	5.546	42.161	7,6
1995/96	6.002	42.291	7,0

Keterangan :

1. Pokok dan bunga pinjaman pemerintah.
2. Termasuk ekspor minyak bumi dan gas alam cair (LNG) atas dasar netto.

Sumber : Pidato Kenegaraan Presiden R.I, 16 Agustus 1996.
Biro Pusat Statistik (BPS), 1996.

Ditinjau dari sisi pemberi pinjaman, sebagian besar pinjaman luar negeri pemerintah (87,7%) telah diterima dari anggota-anggota IGGI/CGI (lihat tabel IV) yang terdiri atas pinjaman bilateral terutama dari Jepang, Amerika Serikat serta Jerman. Dan pinjaman multilateral yang terutama berasal dari Bank dunia dan Bank pembangunan asia. Dalam pada itu, dapat dikemukakan bahwa posisi pinjaman dari bukan anggota IGGI/CGI adalah 5,1 milyar US dollar yang terutama berasal dari Bank-bank diluar negeri.

Dilihat dari persyaratan, pinjaman luar negeri pemerintah dapat dikelompokkan atas pinjaman dalam rangka Official Development Assistance (ODA) yang bersyarat lunak dan bukan ODA. Pada tahun 1991/92 - 1992/93, masing-masing pinjaman tersebut adalah sebesar 1.705 juta US dollar dan 1.335 juta US dollar. Pinjaman dalam rangka ODA terdiri atas bantuan program dalam bentuk pangan (program murni) yang dalam tahun laporan tidak realisasinya. Pinjaman program dalam rangka pinjaman khusus sebesar 561 juta US dollar, dan bantuan proyek sebesar 1.144 juta US dollar. Sementara itu posisi pinjaman bukan ODA seluruhnya berbentuk Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) sebesar 1.335 juta US dollar, karena pada tahun 1992/1993 tidak ada realisasi yang berbentuk pinjaman komersial maupun pinjaman khusus.

Pada tahun 1994/95 - 1995/96, jumlah pemasukan pinjaman luar negeri menunjukkan penurunan dari 0,3 milyar US dollar menjadi 0,2 milyar US dollar. Sementara itu ditinjau dari pangsa keseluruhan terhadap pemasukan modal pemerintah mengalami penurunan.

Pembayaran kembali hutang pokok dan bunga pinjaman luar negeri pemerintah pada tahun 1995/1996 meningkat dari 8,6 milyar US dollar menjadi 9,2 milyar US dollar, yang terdiri dari pelunasan hutang pokok sebesar 3,2 milyar US dollar. Dalam pelunasan hutang pokok tersebut termasuk pula pelepasan pelunasan pinjaman sebesar 724,8 milyar US dollar, yaitu untuk pinjaman International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) sebesar 264,7 juta US dollar dan pinjaman Asian Development Bank (ADB) sebesar

460,1 juta US dollar. Pelunasan hutang pokok tersebut melebihi penarikan pinjaman pemerintah, sehingga lalu lintas modal pemerintah pada tahun 1995/96 mengalami defisit sebesar 0,2 milyar US dollar. Meskipun pembayaran kembali hutang pokok dan bunga pinjaman pemerintah mengalami peningkatan, namun karena peningkatan pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman pemerintah tersebut masih lebih rendah dari pada kenaikan ekspor barang dan jasa, DSR pemerintah menunjukkan penurunan dari 17,7% menjadi 17,0%.

TABEL IV

Persetujuan Pinjaman Luar Negeri pemerintah
Tahun 1990/91 - 1995/96
(dalam juta US dollar)

Tahun	IGGI/CGI 2)	Pangsa %	Non IGGI/ CBI 1), 3)	Pangsa %
1990/91	4.507	90,9	29	9,1
1991/92	5.227	93,8	411	6,2
1992/93	5.574	95,7	246	4,3
1993/94	5.786	98,4	219	2,6
1994/95	5.510	97,5	141	2,5
1995/96	5.387	93,7	365	6,3

Keterangan :

- 1) Termasuk kredit ekspor.
- 2) Termasuk pinjaman dalam rangka bantuan pangan.
- 3) Termasuk pinjaman khusus yang bersyarat lunak dalam membantu program pemerintah.

Sumber : Bank Indonesia ; laporan tahunan
Statistik Indonesia, 1996

Sementara itu, posisi pinjaman luar negeri pemerintah pada akhir tahun 1995/1996 menurun dari 62,6 milyar US

dollar menjadi 58,2 miliar US dollar. Dari jumlah penurunan hutang pemerintah tersebut, sekitar 4,2 milyar US dollar, diantaranya disebabkan oleh pengaruh menguatnya dollar Amerika Serikat, terutama terhadap yen Jepang yang terjadi sejak awal semester II tahun 1995. Ditinjau dari komposisi, sebagian besar pinjaman luar negeri pemerintah yang diterima oleh anggota-anggota CGI terdiri dari pinjaman bilateral, terutama dari IBRD dan ADB. Pinjaman yang diterima dari bukan CGI adalah 7,8% dari jumlah seluruh pinjaman luar negeri pemerintah. Sementara itu, ditinjau dari jangka waktu seluruh pinjaman pemerintah tersebut merupakan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

Sehubungan dengan prinsip kehati-hatian dan keinginan untuk lebih mandiri. Pemerintah secara konsisten melanjutkan pelaksanaan kebijaksanaannya dibidang pinjaman luar negeri. Penarikan pinjaman pemerintah yang berasal dari IGGI/CGI secara nominal menunjukkan penurunan pada tahun 1990 - 1995. Sementara itu, nilai ekspor semakin meningkat terutama ekspor non migas, sehingga nisbah beban hutang (Debt Service Ratio/DSR) pemerintah menurun. Dipihak lain, sejalan dengan arah kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pihak swasta dalam kegiatan perekonomian. DSR swasta masih terus menunjukkan peningkatan, dengan demikian perkembangan pinjaman komersial luar negeri perlu dipantau secara konsisten sebagaimana telah dilakukan oleh tim PKLN (Pinjaman Luar Negeri Komersial).

4.2. Keadaan Ekspor Indonesia

Perkembangan perekonomian Indonesia sebagai suatu perekonomian terbuka tidaklah dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian dunia. Setelah mengalami gejala resesi pada tahun 1990 dan tahun 1991, perkembangan perekonomian dunia pada tahun 1992 sampai tahun 1995 telah menunjukkan sedikit perbaikan. Sementara itu walaupun tindakan proteksi oleh negara-negara maju cenderung meningkat. Pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga-harga komoditi primer bukan minyak menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum menunjukkan kebangkitan ekonomi yang berarti. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Intra-regional negara-negara dikawasan asia timur dan Asean menunjukkan laju yang cukup tinggi. Perkembangan ini antara lain dimungkinkan oleh relokasi industri dari Jepang dan negara-negara industri baru ke negara-negara Asean. Hal tersebut telah memberikan dampak yang menguntungkan bagi Indonesia dalam mendorong ekspor maupun pemasukan modal luar negeri dalam bentuk penanaman modal langsung.

Dimana pada ekspor Indonesia terjadi peningkatan terutama pada sektor non migas yang mempunyai peranan penting pada total ekspor Indonesia, pada tahun 1990/91 peranan ekspor non migas sekitar 56,80% dengan total nilai 15.380 juta US dollar meningkat menjadi 78,2% dengan total nilai sekitar 36.121 juta US dollar pada tahun 1995/96 dibandingkan dengan ekspor migas hanya mempunyai peranan seki-



tar 43,2% pada tahun 1990/91 dengan total nilai 12.763 juta US dollar dan terus menurun sampai pada tahun 1995/96, peranannya tinggal 21,8% dengan nilai sekitar 10.175 US dollar pada total nilai ekspor Indonesia (lihat tabel V dan tabel VI).

Pinjaman yang diperoleh dari IGGI / CGI pada tahun 1994/95 dan 1995/96 sebesar 5.510 juta US dollar dan 5.387 juta US dollar, dibandingkan dengan pinjaman yang diperoleh pada tahun 1993/94, jumlahnya menurun yaitu sebesar 5.786 juta US dollar pada tahun 1993/94. Ini terjadi oleh karena adanya kebijaksanaan pemerintah yang tidak terlalu tergantung kepada pinjaman luar negeri dalam mencari atau menerima modal pembangunan ekonomi dalam negeri.

Upaya peningkatan ekspor non migas juga dilakukan oleh pemerintah bersama-sama pengusaha swasta antara lain; berupa promosi ekspor melalui pengiriman misi-misi dagang, pameran internasional produk Indonesia, dan kegiatan bisnis lainnya di Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di beberapa negara. Sejalan dengan upaya promosi tersebut, pemerintah juga berusaha untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan memperkenalkan skim-skim Counter Trade yang menggunakan sistem pembayaran tertentu serta mengembangkan hubungan perbankan dengan negara-negara tertentu secara bilateral. Sementara itu, pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap pengusaha dalam rangka memantapkan "Standar Mutu Barang Ekspor" pada bulan maret 1994 hanya ada satu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengakomoda-

dasikan standar-standar yang berlaku secara Internasional. Hal ini dilakukan karena komoditi andalan ekspor Indonesia yaitu ekspor migas mengalami penurunan harga sehingga pada sektor ini tidaklah menjadi ekspor andalan yang dapat mendatangkan devisa yang tinggi, maka pemerintah perlu mengantisipasi masalah ini dengan jalan meningkatkan ekspor non migas yang dapat bersaing dipasar Internasional.

TABEL V

Volume, Nilai Espor Non Migas dan Peranannya Terhadap Total Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1990 - 1995/96 (juta US dollar)

Tahun	Volume (ribu ton)	Nilai	Peranannya %
1990/91	40.873	15.380	56,8
1991/92	61.926	19.008	63,9
1992/93	67.609	24.825	70,2
1993/94	109.618	27.170	70,4
1994/95	105.710	31.716	75,7
1995/96	155.588	36.121	78,2

TABEL VI

Volume Nilai Ekspor Migas dan Peranannya Terhadap Total Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1990 - 1995/96 (juta US dollar)

Tahun	Volume (ribu ton)	Nilai	Peranannya %
1990/91	4.095	12.763	43,2
1991/92	3.918	10.706	36,1
1992/93	4.080	10.480	29,8
1993/94	4.175	9.334	29,6
1994/95	4.287	10.445	24,7
1995/96	4.095	10.175	21,8

Sumber : Pidato Kenegaraan Presiden R.I, 17 Agustus 1996.
Biro Pusat Statistik (BPS), September 1996.
Bank Indonesia, Laporan Tahunan, 1995/96.

Semua kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi resesi perekonomian, semata-mata untuk upaya meningkatkan pendapatan dalam negeri, khususnya menambah tabungan dalam negeri/pemerintah. Secara kenyataan dapat dilihat posisi tabungan dalam negeri/pemerintah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mulai pada tahun 1990/91, jumlah tabungan pemerintah berkisar 9.548 milyar rupiah. Untuk tahun 1991/92, tabungan dalam negeri/pemerintah meningkat sebesar 13.421 milyar rupiah, dan sampai pada angka yang tertinggi yakni sebesar 19.017 milyar rupiah pada tahun 1995/96. Oleh karena itu pada tahun 1993/94 posisi tabungan pemerintah berjumlah 13.481 milyar rupiah dan bila melihat kembali pada tahun 1994/95, dengan besarnya tabungan dalam negeri yaitu : 18.191 milyar rupiah, maka terjadi kenaikan sebesar 47,1% ini merupakan kenaikan yang cukup besar (tabel 8).

Dengan adanya kecendrungan meningkatnya posisi tabungan dalam negeri/pemerintah merupakan suatu tekad yang dapat semakin mandiri di dalam membiayai pembangunan, lagi pula merupakan suatu kemajuan pada pengelolaan keuangan negara, karena tabungan pemerintah dalam perkembangannya selalu menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan-peningkatan yang cukup berarti tersebut merupakan penggalian pada berbagai usaha serta pemanfaatan potensial sumber dana yang terdapat di dalam negeri. Di lain pihak yang turut mendukung kesemuanya itu adalah adanya kesadaran masyarakat untuk membangun negerinya sendiri.

Adapun yang menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat berarti adalah : ekspor, dalam hal ini ekspor non migas dan migas. Nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan dalam tahun 1990/91 adalah sebesar 28.143 juta US dollar, pada 1991/92 meningkat menjadi 29.714 juta US dollar, dan pada tahun 1992/93 total nilai ekspor adalah sebesar 35.305 juta US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 16,5% dibandingkan dengan kenaikan sebesar 5,6% pada tahun sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan ekspor non migas sebesar 27,8%. Sementara ekspor migas mengalami penurunan. Dengan pertumbuhan ekspor migas yang masih tinggi maka struktur ekspor Indonesia semakin kuat, yang ditandai dengan terus berkurangnya ketergantungan pada ekspor migas serta didukung oleh semakin beragamnya komoditi yang diekspor.

. Pada tahun 1992/93, pangsa ekspor non migas terhadap total ekspor mencapai 70,2% dibandingkan dengan 63,9% dalam tahun sebelumnya, ekspor non migas terutama ditujukan ke Masyarakat Eropa (ME), yaitu sebesar 19,0% diikuti ke Amerika Serikat sebesar 16,9% dan Jepang sebesar 16,6%. Sementara itu pangsa ekspor non migas ke berbagai negara-negara ASEAN mengalami kenaikan dari 16,6% menjadi 19,05% pada tahun 1992/93. Adapun pangsa ke negara-negara Asia timur, seperti ; Hongkong, Korea, Taiwan, dan Cina, menunjukkan sedikit penurunan dari 14,0% menjadi 12,9%.

TABEL VII
Perkembangan Ekspor Indonesia
Tahun 1990 - 1995/96
(juta US dollar)

Tahun Anggaran	Ekspor Minyak Bumi dan Gas	Ekspor non Migas	Total Ekspor
1990/91	12.763	15.380	28,143
1991/92	10.706	19.008	29,714
1992/93	10.480	24.825	35,305
1993/94	9.334	27.170	36,504
1994/95	10.445	31.716	42,161
1995/96	10.175	36.121	42,296

Sumber : Nota Keuangan Negara (RAPBN), 1995/96.
Biro Pusat Statistik; Indikator Ekonomi, 1995/96.

Peningkatan ekspor non migas yang paling tinggi terjadi pada ekspor komoditi manufaktur, yaitu 38,3%, sementara ekspor komoditi pertambangan dan pertanian mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,9% dan 2,5%. Dengan peningkatan tersebut, pangsa ekspor komoditi manufaktur pada tahun 1992/93 meningkat dari 69,7% menjadi 75,4% dalam total ekspor non migas, dan dari 44,6% menjadi 52,9% terhadap total ekspor. Peningkatan pangsa ekspor komoditi manufaktur terhadap total ekspor nonmigas menunjukkan bahwa struktur ekspor non migas semakin kuat.

Pada tahun 1993/94, total nilai ekspor Indonesia semakin meningkat menjadi 36,504 juta US dollar, dan pada tahun 1994/95 total nilai ekspor Indonesia sebesar 42.161 atau meningkat menjadi 15,3% dari tahun sebelumnya. Dalam tahun 1995/96 total ekspor (migas dan nonmigas) meningkat, dari 42.161 juta US dollar di tahun 1995/96 menjadi 42,296



juta US dollar, atau meningkat sekitar 10,0% pada tahun 1995/96. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 15,3% dalam tahun sebelumnya.

Melambatnya ekspor tersebut selain disebabkan oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang semakin melambat juga dipengaruhi oleh menurunnya nilai ekspor migas.

Ekspor non migas dalam tahun 1995/96 meningkat dari 31.716 juta US dollar menjadi 36.121 juta US dollar atau 13,9% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 16,5% dalam tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor yang berarti pada kelompok komoditas pertanian sebagai akibat menurunnya harga dan volume ekspor beberapa komoditas pertanian serta pulihnya ekspor beberapa komoditas manufaktur andalan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal. Disisi eksternal, masuknya negara-negara pesaing baru menyebabkan persaingan di pasar internasional, khususnya pada komoditas manufaktur utama seperti ; tekstil, produk kayu, dan alas kaki, semakin tajam.

Negara-negara pesaing baru tersebut pada umumnya mampu menghasilkan produk-produk ekspor yang harganya lebih rendah dengan kualitas hampir sama dengan produk Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan untuk meningkatkan ekspor meskipun peluangnya cukup terbuka, sejalan dengan masih tingginya pertumbuhan volume perdagangan dunia. Disisi internal, industri penghasil devisa

utama, seperti industri kayu lapis, tekstil, dan sepatu, masih menghadapi berbagai masalah sehingga mengurangi kemampuan dan daya saing eksportir Indonesia. Disamping itu, komposisi ekspor yang masih bertumpu pada produk manufaktur yang berkategori "unskilled labor intensive" dan "natural resources intensive" merupakan faktor lain yang menyulitkan peningkatan ekspor sebagai akibat persaingan yang semakin tajam. Sementara itu kuatnya permintaan domestik juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekspor nonmigas sebagai akibat meningkatnya penggunaan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ditinjau dari komposisi ekspor, komoditas manufaktur masih tetap memberikan sumbangan yang paling besar pada ekspor non migas, dengan pangsa mencapai sekitar 74,9% dari total ekspor nonmigas, diikuti oleh komoditas pertanian sekitar 15,1% dan komoditas bahan tambang sebesar 10,0%. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, ekspor kelompok bahan tambang mencatat pertumbuhan yang paling tinggi yakni 32,0%, diikuti oleh barang manufaktur sebesar 17,4%, sedangkan nilai ekspor komoditas pertanian mengalami pertumbuhan negatif sebesar (-) 8,1%. Berdasarkan negara tujuan, perkembangan ekspor nonmigas pada tahun 1995/96 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar ekspor nonmigas masih ditujukan ke kawasan Asia, khususnya Jepang, dan negara-negara ASEAN, disamping ke Amerika Serikat dan Eropa.

Dalam sektor ekspor migas, nilai ek migas pada tahun

1990/91 adalah sebesar 12.763 juta US dollar dan pada tahun 1991/92 total nilai ekspor migas sebesar 10.706 juta US dollar atau turun dari tahun sebelumnya. Juga pada tahun 1992/93 nilai ekspor migas turun menjadi 10.480 juta US dollar.

Selama tahun 1992/93, harga minyak dunia secara rata-rata tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan harga pada tahun sebelumnya. Walaupun dalam bulan-bulan terakhir tahun laporan menunjukkan adanya kecendrungan menurun. Sebagai gambaran, harga patokan OPEC untuk jenis "Arabian Light Crude (ALC)" sebesar 21.00 US dollar per barel tidak pernah tercapai dan harga hanya bergerak pada kisaran 17.25 dollar AS sampai 18,95 US dollar per barel. Kecendrungan penurunan harga tersebut antara lain disebabkan oleh bertambahnya pasokan minyak dunia setelah minyak Kuwait kembali normal sebagaimana produksinya sebelum krisis teluk, yaitu 0,925 juta barel perhari. Sementara itu, untuk memperbaiki tingkat harga, pada bulan pebruari 1993 negara-negara OPEC sepakat untuk mengurangi tingkat produksi dari 24.588 juta barel menjadi 23.600 juta barel perhari yang berlaku untuk periode Maret-Juni 1993. Sejalan dengan pengurangan produksi tersebut, kuota produksi Indonesia yang semula sebesar 1.374 juta barel perhari dikurangi menjadi 1.319 juta barel perhari. Walaupun harga minyak pada bulan-bulan terakhir menunjukkan penurunan, harga rata-rata ekspor minyak bumi Indonesia selama tahun 1992/93 adalah 18,57 dollar AS per

barel yang ternyata masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 18,29 US dollar per barel pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, volume ekspor minyak bumi mengalami penurunan dari 382,5 juta barel menjadi 352,8 juta barel pada tahun 1992/93. Penurunan ekspor tersebut berkaitan erat dengan turunnya tingkat produksi serta kondensat dan masih tingginya tingkat konsumsi BBM di dalam negeri. Kalau pada tahun sebelumnya tingkat produksi minyak dan kondensat mencapai 1,562 juta barel per hari maka pada tahun 1992/93 sedikit menurun menjadi 1,506 juta barel per hari.

Nilai ekspor migas pada tahun 1993/94 adalah sebesar 9.334 juta US dollar dan pada tahun 1994/95 naik kembali menjadi 10.445 juta US dollar. Ini disebabkan oleh karena kenaikan harga minyak mentah menjadi stabil. Nilai ekspor pada tahun 1994/95 meningkat menjadi 11,8%. Pada tahun 1995/96 menurun 2,9%, yaitu dari 10,445 juta US dollar menjadi 10,175 juta oleh menurunnya volume ekspor minyak bumi sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi dalam negeri. Seiring dengan berkembangnya sektor industri dan transportasi. Sementara itu, ekspor gas yang terdiri dari gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) dan gas minyak cair (Liquified Petroleum Gas/LPG) tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan dengan ekspor gas tahun sebelumnya, yakni mencapai sekitar 4,1 milyar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, nilai ekspor migas pada tahun 1995/96 mengalami penurunan, dan sejalan dengan itu pangsaanya terhadap total ekspor juga menurun dari 24,7% menjadi 21,8%. Dapat dikemukakan bahwa harga rata-

rata ekspor minyak Indonesia pada tahun 1995/96 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yakni mencapai 17,2 US dollar per barel, lebih tinggi dari pada harga rata-rata ekspor minyak dalam tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16,5 US dollar per barel. Membaiknya harga rata-rata ekspor minyak tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan minyak dunia, khususnya dari Amerika Serikat dan Eropa, serta terkendalinya pasokan minyak di pasar dunia oleh negara-negara produsen minyak.

Oleh karena adanya pengaruh resesi dunia pada tahun 1990/91 - 1991/92, maka posisi cadangan Indonesia turut pula merosot. Namun pada tahun 1992/93 perekonomian Indonesia kembali normal dan neraca pembayaran Indonesia kembali membaik.

Sejalan dengan membaiknya posisi neraca pembayaran Indonesia, cadangan devisa di Bank Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,4 milyar US dollar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa resmi di Bank Indonesia pada akhir maret 1993 menjadi 12,0 milyar US dollar. Dengan memperhitungkan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank-bank devisa yang berjumlah 2,5 milyar US dollar, posisi cadangan devisa nasional mencapai 14,5 milyar US dollar atau cukup membiayai impor non migas selama 6,6 bulan. Pada tahun 1995/96 posisi cadangan devisa Indonesia adalah sebesar 16,0 milyar US dollar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan tahun sebelum-

nya. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 4,7 bulan impor non migas.

TABEL VIII

Tabungan Pemerintah dan Keadaan Ekspor Indonesia
Periode Tahun 1990 - 1995

: Tahun :	: Tabungan : Pemerintah : (milyar Rp) :	: Nilai Ekspor (juta US dollar) :	
		: Migas :	: Nonmigas :
: 1990/91 :	: 9.548 :	: 12.763 :	: 15.380 :
: 1991/92 :	: 11.357 :	: 10.706 :	: 19.008 :
: 1992/93 :	: 13.421 :	: 10.480 :	: 24.825 :
: 1993/94 :	: 13.481 :	: 9.334 :	: 27.170 :
: 1994/95 :	: 18.191 :	: 10.445 :	: 31.716 :
: 1995/96 :	: 19.017 :	: 10.175 :	: 36.121 :

Sumber : Indikator Ekonomi, September 1996.
Nota Keuangan Negara / RAPBN 1995/96.
(disederhanakan dan diolah kembali oleh penulis)

Dalam tahun 1992/93, nilai rupiah mengalami depre-
siasi nominal sebesar 4,8% terhadap dollar Amerika Serikat
dan terhadap basket mata uang mitra dagang Indonesia rata-
rata sebesar 2,1%. Dengan memperhitungkan laju inflasi di
Indonesia dan laju inflasi negara-negara mitra dagang,
maka selama periode 1990/91 - 1992/93 nilai tukar efektif
riil yang merupakan salah satu indikator daya saing barang
ekspor, khususnya nonmigas dapat dipertahankan. Hal ini
sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam memelihara
nilai tukar yang realistis guna mempertahankan daya saing
barang-barang ekspor di pasaran internasional dan barang-
barang produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor.
Dalam upaya untuk mengurangi pengaruh negatif gejo-



lak nilai tukar diantara beberapa mata uang utama dunia, Bank Indonesia selalu berupaya untuk menyesuaikan komposisi cadangan devisa dengan kebutuhan pembayaran pinjaman luar negeri dan impor. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka menghadapi berbagai perkembangan yang kurang menguntungkan dan sebagai upaya untuk menjaga kemantapan neraca pembayaran. Pemerintah tetap menempuh kebijakan untuk memelihara pinjaman siaga yang sewaktu-waktu dapat ditarik apabila diperlukan, yang berjumlah 2 milyar US dollar.

Depresiasi rupiah secara nominal terhadap dollar Amerika Serikat selama tahun 1995/96 mencapai 5,35%, lebih besar dibandingkan dengan depresiasi sebesar 3,38% dalam tahun sebelumnya. Sementara itu terhadap mark Jerman, rupiah mengalami depresiasi yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,58%. Adapun terhadap yen Jepang, rupiah mengalami apresiasi sebesar 13,27%. Sebagai akibat melemahnya valuta yen terhadap dollar, terutama sejak awal triwulan II tahun 1995/96. Selanjutnya, dapat ditambahkan bahwa nilai tukar riil rupiah terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama Indonesia dalam tahun laporan mengalami apresiasi sekitar 10,24%.

4.3. Pinjaman Luar Negeri dan Perekonomian Indonesia

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pinjaman luar negeri negeri sebaiknya diadakan penekanan/dikurangi, dan ini diakui oleh pemerintah sendiri dengan adanya usaha

untuk membatasi pinjaman luar negeri yang dilakukan pada tahun 1993/1994 dimana pinjaman pemerintah berjumlah 10.372 milyar rupiah, dan untuk tahun 1992 pinjaman pemerintah sebesar 10.716 milyar rupiah. Oleh karena itu pemerintah telah mampu menekan/mengurangi pinjaman sebesar; 344 milyar rupiah, sedangkan untuk tahun 1994, pinjaman luar negeri pemerintah kembali naik sebesar 10.983 milyar rupiah, serta pada tahun 1995 naik menjadi sebesar 11.170 milyar rupiah, ini terjadi akibat merosotnya atau turun nilai ekspor Indonesia pada sektor non migas khususnya pada bidang pertanian, padahal kita ketahui bahwa andalan ekspor Indonesia pada sektor non migas adalah bidang pertanian dan juga Indonesia terkenal sebagai negara agraris, sehingga pemerintah butuh kembali banyak dana untuk membangun dan meningkatkan produksi pada bidang pertanian, adapun dana yang dihimpun tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman/bantuan luar negeri pemerintah yang khusus diberikan untuk membangun kembali sektor pertanian. Hal ini merupakan suatu angka kenaikan yang sangat sulit dibendung mengalirnya arus pinjaman luar negeri yang datangnya dari dari negara-negara industri/donor. Oleh karena itu diperlakukanlah langkah-langkah untuk dapat menekan arus tersebut, seperti meningkatkan sumber daya alam yang terkenal sangat potensial.

Pada tahun 1990/91 - 1993/94 dana pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri meningkat 2,9% sehingga mencapai Rp.107 triliun yang berarti melambat bila dibandingkan dengan peningkatan sebesar 5,1% dalam tahun

1991/92. Perlambatan tersebut sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang lebih berhati-hati dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri. Dengan perkembangan tersebut, peranan pinjaman luar negeri terhadap dana pembangunan berhasil dikurangi dari 47,8% menjadi 44,4% dalam tahun 1993/94 dan sejalan dengan itu, peranan pinjaman terhadap penerimaan pemerintah juga menurun dari 20,0% menjadi 18,4% dari jumlah penerimaan pembangunan tersebut, sebesar Rp.0,5 triliun merupakan bantuan program adanya penurunan peranan pinjaman luar negeri tersebut menunjukkan kemandirian pemerintah yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan.

TABEL IX

Pelunasan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah
Tahun 1990/91 - 1995/96
(dalam juta US dollar)

Tahun	Pelunasan Pinjaman 1)	Nilai Ekspor 2)	% Dari Nilai Ekspor
1990/91	4.082	28.143	6,9
1991/92	4.182	29.714	7,1
1992/93	4.840	35.305	7,3
1993/94	5.132	36.504	7,1
1994/95	5.546	42.161	7,6
1995/96	5.002	42.291	7,0

Catatan :

- 1) Pokok dan bunga pinjaman pemerintah.
- 2) Termasuk ekspor minyak bumi atas dasar netto.
- 3) Termasuk ekspor gas alam cair (LNG).

Sumber : Pidato Kenegaraan, berbagai lampiran (tahunan).
Bank Indonesia, Boro pusat Statistik (BPS).

Pembayaran kembali hutang pokok dan bunga pinjaman luar negeri pemerintah pada tahun 1995/96 meningkat dari

8,6 milyar US dollar menjadi 9,2 milyar US dollar. Terdiri dari pelunasan hutang pokok sebesar 6,0 milyar US dollar dan bunga sebesar 3,2 milyar US dollar. Dalam pelunasan hutang pokok tersebut termasuk pula percepatan pelunasan pinjaman sebesar 724,8 juta US dollar, yaitu untuk pinjaman IBRD sebesar 264,7 juta US dollar dan pinjaman ADB sebesar 460,1 juta US dollar. Pelunasan hutang pokok tersebut melebihi penarikan pinjaman pemerintah, sehingga lalu lintas modal pemerintah pada tahun 1995/96 mengalami defisit sebesar 0,2 milyar US dollar. Meskipun pembayaran kembali hutang pokok dan bunga pinjaman pemerintah mengalami peningkatan, namun karena peningkatan pembayaran kembali hutang pokok dan bunga pinjaman pemerintah tersebut masih lebih rendah dari pada kenaikan ekspor barang dan jasa, DSR (Debt Service Ratio) pemerintah menunjukkan penurunan dari 17,7% menjadi 17,0%.

Dilihat pinjaman luar negeri pemerintah pada tahun 1996/97, maka angka pinjaman tersebut menunjukkan sebesar; 298 milyar rupiah, dan ini belum termasuk pinjaman dari negara-negara anggota CGI yang jumlahnya berkisar ; 7,8 trilyun. Jadi untuk tahun 1996/97 total keseluruhan berjumlah : Rp.8,098 trilyun.

Meskipun demikian, angka tersebut diatas tidaklah keseluruhannya tergolong pinjaman, tetapi ada juga yang termasuk dalam bentuk hibah (grant), dimana jumlah bantuan hibah ini datangnya dari negara-negara ; Amerika Serikat, Belanda, Kanada, serta Australia. Keempat negara inilah

yang merupakan negara yang besar peranannya didalam pemberian bantuan hibah.

Pada tahun yang sama (1996/97) kewajiban pemerintah untuk membayar angsuran pinjaman/hutangnya dengan jumlah yang berkisar ; 7,8 trilyun atau naik 17,1% dari jumlah pada tahun 1995/96 sekitar 11,1% kenaikannya dari tahun 1994/95. Hal ini dipengaruhi oleh makin banyaknya hutang pemerintah yang akan jatuh tempo dan disediakan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar antara mata uang kuat dunia dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap berbagai valuta asing tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi mengenai kedudukan pinjaman luar negeri didalam APBN khususnya pada periode tahun 1996/97 dengan melihat latar belakang peluang yang ada dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi, penerimaan dalam negeri pemerintah dalam tahun 1996/97 diperkirakan mencapai Rp.81,3 trilyun atau meningkat 7,5% dibandingkan dengan 17,8% pada tahun sebelumnya. Dari total penerimaan tersebut, pangsa penerimaan migas adalah sebesar 17,4% dan non migas 82,6%, penerimaan pajak dianggarkan meningkat 15,6% dan bukan pajak turun 6,8%. Sementara itu, dengan perkiraan harga minyak bumi rata-rata selama tahun anggaran 1996/97 sebesar 16,5 US dollar/barel dan tingkat produksi sebesar 1,52 juta barel perhari. penerimaan migas dianggarkan turun sekitar 4,9% dari realisasi tahun 1995/96, apabila harga minyak ini merosot turun, maka hal ini berarti sudah pasti berpengaruh pada sektor-sektor ekonomi secara umum, khususnya perekonomian

Indonesia. Dan manakal hal ini menjadi kenyataan, maka pihak pemerintah harus mengandalkan penerimaanya pada sektor non migas, dan untuk pengusahaan sumber dana untuk memacu kembali peningkatan penerimaan pada sektor migas, maka pemerintah masih perlu meningkatkan pinjaman luar negerinya sebagai salah satu sumber dari penerimaan dana untuk pembangunan.

Sementara itu, dampak neraca pembayaran keuangan pemerintah secara keseluruhan diperkirakan masih akan menunjukkan Net Out Flow, ekuivalen sekitar Rp.5,8 trilyun. Terutama sebagai akibatnya tingginya pembayaran bunga/cicilan hutang luar negeri, maka dar itu pemerintah dengan pinjaman luar negerinya harus aktif menyalurkan dana tersebut kedaerah-daerah, agar dana yang berasal dari pinjaman luar negeri tersebut dapat diarahkan pada sektor-sektor yang produktif.

Dengan melalui produktivitas sektoral diharapkan dapat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menciptakan peningkatan pendapatan perkapita yang nantinya diharapkan menjadi sumber pembentukan tabungan nasional/pemerintah, maka kebutuhan akan dana pinjaman luar negeri tidak banyak diharapkan untuk dapat membiayai pembangunan didalam negeri sendiri, cukup dengan menggalakkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri utamanya nilai ekspor, serta beberapa sumbangan positif lainnya yang dapat mengisi tabungan pemerintah, seperti ; di sektor jasa dan pengangkutan, dimana sektor ini cukup

produktif didalam pengelolaannya.



TABEL X

Posisi Tabungan Pemerintah, Penerimaan Pembangunan
Dan Pengeluaran Dalam Negeri
Dalam tahun 1990 - 1995
(milyar rupiah)

Pos Anggaran	Periode					
	90/91	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96
- Dana Pembangunan	19.452	21.764	24.135	25.661	29.163	29.812
- Tabungan dalam Negeri	9.548	11.357	13.421	13.481	18.191	19.017
- Bantuan Luar Negeri	9.905	10.409	10.716	10.372	10.983	11.170

Sumber : Nota Keuangan Negara/RAPEN 1995/96.
Indikator Ekonomi, September 1996.
(disederhanakan dan diolah kembali oleh penulis)

Dengan melihat angka-angka pada tabel X, dana pembangunan pada tahun 1990/91 adalah sebesar 19.452 milyar rupiah kemudian pada tahun 1991/92 dana pembangunan meningkat menjadi sebesar 21.764 milyar rupiah. Meningkat sebesar 23,1% dari tahun sebelumnya, juga pada tahun 1993/94, dana pembangunan meningkat sebesar Rp.25.661 milyar dari tahun sebelumnya yang sekitar 24.135 milyar rupiah (1992/93), atau meningkat sebesar 15,2%. Dan untuk tahun 1995/96 dana pembangunan meningkat sebesar 29.812 milyar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 29.163 milyar rupiah (pada tahun 1994/95), meningkat sebesar 1,02%. Peningkatan pada pos anggaran dana pembangunan ini karena semakin meningkatnya ekspor Indonesia keluar negeri yang otomatis

menambah pendapatan pemerintah sehingga turut pula meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk dana pembangunan, juga kalau dilihat pada pos anggaran tabungan pemerintah jumlahnya juga selalu meningkat yaitu; pada tahun 1990/91 jumlah tabungan dalam negeri sebesar 9.548 milyar rupiah, meningkat menjadi 19.017 milyar rupiah pada tahun 1995/96, atau meningkat 94,6% dari tahun 1990/91 (selama tahun penulisan ini). Ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pemerintah pada ekspor terutama pada ekspor non migas.

Sedangkan untuk posisi bantuan luar negeri pada tahun 1990/91 berjumlah sebesar Rp.9.905 milyar. Untuk tahun 1991/92 naik sebesar Rp.10.409 milyar atau naik sekitar 5,04%. Pada tahun 1992/93 pinjaman luar negeri pemerintah naik sebesar Rp.10716 milyar, atau naik sebesar 3,07% dibanding dengan tahun sebelumnya, namun pada tahun 1993/94 pinjaman luar negeri Indonesia turun menjadi sebesar 10.372 milyar rupiah, ini disebabkan karena pada tahun tersebut harga minyak kembali membaik sehingga ekspor sektor migas naik yang otomatis menambah devisa dalam negeri pemerintah. Tapi pada tahun 1994/95 pinjaman luar negeri pemerintah naik kembali sebesar 10.983 milyar rupiah, dan juga pada tahun 1995/96 naik sebesar 11.170 milyar rupiah, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut ekspor non migas Indonesia pada sektor pertanian turun, padahal kita ketahui pada sektor tersebut merupakan komoditi andalan untuk ekspor Indonesia, sehingga untuk meningkatkan kembali ekspor pada sektor pertanian, maka perlu dana, termasuk

dana pinjaman luar negeri pemerintah. Sehingga dapat menunjang naiknya kembali ekspor non migas Indonesia yang otomatis, neraca pembayaran dan cadangan devisa pemerintah kembali stabil/normal.

Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan struktur ekonomi (dalam Pelita V dan awal Pelita VI sudah diterapkan) sebagai dasar berpijak untuk menjadi pra kondisi tinggal landas seperti dengan adanya pergeseran sumbangan pada produksi domestik bruto (PDB) yaitu; dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu; meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk dapat menambah tabungan dalam negeri/pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang akan menggantikan peranan dana dari sektor luar negeri (pinjaman luar negeri).

• Untuk menciptakan suasana tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian khusus yakni ; pengeluaran pembangunan. Sebab yang menjadi sumber dana tabungan pemerintah berasal dari sisa pengeluaran pembangunan, selain itu pengeluaran rutin semakin kecil dana anggarannya karena adanya akan kebutuhan pinjaman luar negeri yang begitu banyak menyerap dana tersebut. oleh karena itu pinjaman luar negeri pemerintah dapat dikurangi, sehingga pelunasan akan beban cicilan bunga pinjaman tidak lagi memakan dana yang cukup besar, maka secara tidak langsung pengeluaran biaya rutin pemerintah dapat ditekan. Kesemuanya ini akan membuat dana pembangunan meningkat, karena adanya konsep penekanan akan arus mengalirnya pinjaman luar negeri pemerintah.

Pada tabel XI memperlihatkan posisi pelunasan pinjaman luar negeri, juga mengenai keadaan tabungan pemerintah yang ditunjang oleh nilai ekspor.

TABEL XI

Posisi Tabungan Pemerintah, Pelunasan Pinjaman Luar Negeri, dan Nilai Ekspor Tahun 1990 - 1995

Tahun	Tabungan Pemerintah (milyar Rp.)	Pelunasan Pinjaman 1) (juta US \$)	Nilai Ekspor 2) (juta US \$)	Pinjaman IGGI/CGI 3) (juta US \$)
1990/91	9.548	4.082	28.143	31.431
1991/92	11.357	4.182	29.714	37.800
1992/93	13.421	4.840	35.305	42.908
1993/94	13.481	5.132	36.504 4)	57.812
1994/95	18.191	5.546	42.161	58.809
1995/96	19.017	6.002	42.291	55.207

Catatan :

- 1) Pokok dan bunga pinjaman pemerintah
- 2) Termasuk ekspor minyak bumi atas dasar netto
- 3) Termasuk pinjaman lunak dan setengah lunak
- 4) Termasuk ekspor gas alam cair (LNG)

Sumber : Nota Keuangan Negara / APBN, 1995/96
Indikator Ekonomi, September 1996
(disederhanakan dan diolah kembali oleh penulis)

Dengan melihat nagka-angka pada tabel XI, utamanya angka tabungan pemerintah yang pada setiap tahun anggaran terjadi kenaikan sekitar ; 18.09%. Untuk tabungan pemerintah dalam periode tahun 1995/96 berjumlah sebesar 19.017 milyar rupiah (dengan perhitungan pada semester I ; 6.931 milyar rupiah dan semester II ; 12.086 milyar rupiah).

Tetapi dengan melihat pada tabel I, dimana terdapat

jumlah pengeluaran pembangunan yang jauh lebih besar dari pada jumlah tabungan pemerintah, maka diperlukannya sarana-sarana lain untuk mengimbangi, salah satu sarana yang dilakukan pemerintah yakni : mengadakan pinjaman luar negeri, yang secara aktualnya terlihat bahwa sudah tidak lagi merupakan sumber dana pelengkap dalam pembiayaan pembangunan tetapi merupakan substitusi, sehingga tidak selaras lagi dengan apa yang telah digariskan didalam Ketetapan MPR No. II/NPR/1983 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1993, tentang GBHN yang menetapkan strategi dalam pembiayaan pembangunan ekonomi negara Indonesia sebagai berikut : untuk pelaksanaan Pelita VI diperlukan pembiayaan yang memadai, yang terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri sedangkan untuk sumber dari luar negeri hanya merupakan sebagai sumber pelengkap.

. Pada kenyataannya jumlah pinjaman luar negeri dan jumlah tabungan pemerintah terdapat selisih angka yang tidak besar dimana angka jumlah pinjaman luar negeri pemerintah lebih besar dibanding angka jumlah tabungan dalam negeri/pemerintah, pada tahun 1990/91, yaitu jumlah pinjaman luar negeri sebesar 9.905 milyar rupiah, sedangkan jumlah tabungan pemerintah sebesar 9.548 milyar rupiah, artinya jumlah pinjaman luar negeri masih lebih besar, yakni sejumlah 357 milyar rupiah, dibandingkan dengan tabungan pemerintah, namun pada tahun-tahun ke atas (1992/93 sampai 1995/96) jumlah tabungan pemerintah lebih besar dibanding dengan jumlah pinjaman luar negeri, ini disebabkan oleh kenaikan ekspor Indonesia, terutama pada ekspor non-

migas yang mampu menggantikan peran dari sektor migas yang semakin menurun jumlah peranannya terhadap ekspor.

Memang diakui pada dekade tahun 80-an jumlah pinjaman luar negeri berfluktuasi jumlahnya dengan tabungan pemerintah, namun pada dekade tahun 90-an, jumlah tabungan pemerintah sudah lebih besar dari jumlah pinjaman luar negeri dan ini dibuktikan dengan melihat tabel XII, yaitu pada tahun akhir penulisan ini (tahun 1995/96) jumlah pinjaman luar negeri sebesar 11.170 milyar rupiah dan jumlah tabungan pemerintah sebesar 19.017 milyar rupiah, artinya pemerintah sudah mampu meningkatkan jumlah tabungannya dengan cara mendorong peningkatan jumlah ekspor di berbagai sektor.

TABEL XII

Posisi Pinjaman Luar Negeri Dan Tabungan Pemerintah
Untuk Pembangunan Tahun 1990 - 1995
(dalam milyar rupiah)

: Tahun	: Pinjaman : Luar Negeri *)	: Tabungan : Dalam Negeri	: Pengeluaran Pemerintah :	
			: Rutin	: Pembangunan :
: 1990/91	: 9.905	: 9.548	: 29.998	: 19.452
: 1991/92	: 10.409	: 11.357	: 30.228	: 21.764
: 1992/93	: 10.716	: 13.421	: 36.031	: 24.135
: 1993/94	: 10.372	: 13.481	: 38.799	: 25.661
: 1994/95	: 10.983	: 18.191	: 43.179	: 29.163
: 1995/96	: 11.170	: 19.017	: 52.541	: 29.812

Keterangan :

* Termasuk pinjaman tunai, Pinjaman lunak, Pinjaman setengah lunak, dan komersial (termasuk kredit ekspor).

Sumber : Pidato kenegaraan Presiden R.I, berbagai lampiran BPS ; Indikator Ekonomi, September 1996.
(disederhanakan dan diolah kembali oleh penulis)



Tapi perlu diingat bahwa peranan pinjaman luar negeri terhadap dana pembangunan masih mempunyai pengaruh yang kuat, yaitu sekitar 44,4%, artinya pinjaman luar negeri masih sangat dibutuhkan untuk pembiayaan-pembiayaan pembangunan perekonomian. Ini dapat dilihat pada tabel XII, dana pembangunan pada tahun 1995/96 sebesar 29.812 milyar rupiah, pinjaman luar negeri pada tahun 1995/96 sebesar 11.170 milyar rupiah, dan apabila digabungkan antara pinjaman luar negeri dengan tabungan pemerintah pada tahun 1995/96 maka jumlahnya sebesar 30.187 milyar rupiah dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan yang sebesar 29.817 milyar rupiah maka hanya surplus sebesar 370 milyar rupiah yang tersisa untuk tabungan pemerintah pada tahun selanjutnya.

Bila melihat tabel XII, maka posisi pinjaman luar negeri semakin besar jumlahnya, tabungan pemerintah juga meningkat namun pengeluaran pemerintah untuk dana pembangunan meningkat sangat besar sehingga pinjaman luar negeri masih dapat dikategorikan sebagai dana pengganti/substitusi untuk membiayai pembangunan dalam negeri.

Ini dapat dibuktikan dengan adanya angka-angka yang besar pada pinjaman luar negeri, artinya dana dari luar dalam hal ini pinjaman luar negeri masih sangat besar peranannya di dalam membiayai pembangunan.

Dalam tahun 1995/96 perekonomian Indonesia memperlihatkan perkembangan yang semakin pesat. Akselerasi kinerja perekonomian yang sudah mulai tampak sejak pertengahan

tahun 1994 semakin mendapat dorongan dari berbagai perkembangan yang terjadi khususnya di dalam negeri. Tetapi terjaganya stabilitas ekonomi secara makro dan semakin mantapnya perkembangan faktor-faktor fundamental ekonomi didalam negeri menjadi latar belakang pesatnya peningkatan permintaan domestik.

Pesatnya kegiatan perekonomian yang dipacu oleh permintaan domestik tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai 8,1% pada tahun 1995. Dengan perkembangan tersebut, PDB perkapita telah mencapai 1.023 US dolar. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diikuti oleh kecendrungan memanasnya suhu perekonomian. Maraknya kegiatan investasi dan konsumsi di dalam negeri mengakibatkan kenaikan pertumbuhan yang tajam pada beberapa sektor ekonomi, seperti sektor konstruksi dan sektor industri, misalnya industri semen, kertas dan otomotif. Pemanfaatan kapasitas produksi pada sektor-sektor tersebut mencapai tingkat yang tinggi. Gejala-gejala kenaikan harga pada beberapa produk dalam negeri mulai terlihat. Kondisi produksi dan distribusi disektor pertanian yang relatif kurang menguntungkan dalam tahun laporan menambah kesenjangan ini dari sisi penawaran. Tekanan-tekanan inflasi terasa tetap tinggi dan laju inflasi dalam tahun 1995/96 mencapai 8,9%. Kuatnya permintaan domestik juga tercermin pada posisi eksternal Indonesia. Kenaikan permintaan yang tidak dapat diimbangi sepenuhnya oleh kenaikan produksi di dalam negeri akhirnya harus dipenuhi oleh impor yang sangat melonjak dalam tahun 1995/96.

Dengan perkembangan ekspor yang relatif melambat karena berbagai sebab, baik pada sisi permintaan maupun penawaran, defisit transaksi berjalan naik tajam, dari 2,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 3,3% dari PDB pada tahun 1995/96.

Dalam tahun 1995/96, pemerintah membatasi pengeluaran investasi untuk lebih mendorong peranan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, pengeluaran investasi pemerintah masih meningkat 2,5% sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 1,1% dalam tahun sebelumnya. Pengeluaran investasi diprioritaskan untuk menunjang upaya pemerataan pembangunan, pengembangan potensi daerah, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu, pengeluaran tersebut juga ditandai oleh upaya pemerintah untuk lebih mendorong peranan swasta dalam kegiatan ekonomi mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan AFTA (Asean Free Trade Area).

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Dengan jalan mengadakan usaha guna meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri yang merupakan suatu keharusan bagi pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan tabungan dalam negeri/pemerintah, tetapi usaha ini tidak terlepas dari ketergantungan dengan berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam penerapannya pada paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 yang mengarah kepada peningkatan ekspor komoditi non migas dan kebijaksanaan pada sektor pajak, kemudian disusul pada paket deregulasi Mei 1993 yang antara lain mencakup bidang penanaman modal dan penyederhanaan perizinan di bidang perindustrian. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan penswastan BUMN. Langkah tersebut selain dapat meningkatkan penerimaan negara juga dapat membantu peningkatan efisiensi.

pada sisi lain, pihak pemerintah bermaksud untuk dapat mempertahankan keseimbangan Anggaran Belanja Negara (ABN), tetapi dilain pihak masih ada yang harus dianggap perlu untuk mendapat perhatian khusus bagi pihak pemerintah yaitu, mengadakan pembaharuan di bidang keuangan/perbankan khususnya meneliti posisi tabungan pemerintah agar dapat dipertahankan atau diadakan peningkatan lebih besar dari pada jumlah yang di capai selama Pelita I sampai dengan periode Pelita VI.



Dimana di dalam tahun pertama realisasi tabungan dalam negeri/pemerintah hanya mencapai jumlah sebesar 27,2 milyar rupiah. Sedangkan untuk tahun terakhir Pelita II realisasi tabungan pemerintah meningkat dibanding pada Pelita I yakni, mencapai jumlah sebesar 1.552,4 milyar rupiah. Untuk Pelita III angka tabungan pemerintah mencapai 6.476,5 milyar rupiah. Pada Pelita IV tabungan pemerintah sebesar 7.301,3 milyar rupiah. Sedangkan pada Pelita V jumlah tabungan pemerintah sebesar 13.481 milyar rupiah dan untuk tahun-tahun pertama Pelita VI yaitu tahun 1995/96 tabungan pemerintah mencapai puncak klimaknya sampai pada jumlah 19.017 milyar rupiah.

Dengan adanya kenaikan pada tabungan pemerintah telah memberikan isyarat bahwa penggalian sumber-sumber dalam negeri utamanya dalam penerimaan sektoral, telah mampu menopang perekonomian Indonesia, walaupun pada segi lain terjadi kenaikan di sektor luar negeri di mana terjadi peningkatan sumber dana pinjaman luar negeri, tetapi hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan pada sumber pengeluaran pembangunan, yang mengakibatkan dana dari dalam negeri/tabungan pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai proyek pembangunan.

Olehnya itu diperlukanlah dana dari luar negeri yang kedudukannya sebagai pelengkap menurut Tap. MPR No. II/MPR/1983, kemudian Tap. MPR No. II/MPR/1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tetapi bila melihat jumlah dana pinjaman dari luar negeri (bantuan proyek dan

program) sejak pada tahun 1990-an telah terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya (lihat tabel II dan IV) sehingga dapat dikategorikan sebagai pengganti/substitusi dari pada tabungan pemerintah untuk membantu dalam membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.

Di dalam mengusahakan pinjaman luar negeri, pemerintah senantiasa berpegang pada kebijaksanaan pengendalian hutang-hutang luar negeri dengan tetap menjaga agar perbandingan pelunasan angsuran dan pembayaran bunga pinjaman terhadap penghasilan devisa dari ekspor berkembang pada tingkat yang cukup aman di dalam kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Searah dengan meningkatnya pinjaman luar negeri pemerintah, yang juga tabungan pemerintah turut pula meningkat. Dimana kedua-duanya sama-sama membentuk dana pembangunan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Semakin berkembangnya dana pembangunan berarti semakin luas jangkauan pembangunan yang dapat dilaksanakan.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang mendukung meningkatnya tabungan pemerintah, adalah sektor ekspor (migas dan non migas), sedangkan untuk menghadapi dampak gejolak perekonomian dunia pada perkembangan ekspor di luar migas maka pihak pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri/tabungan, seperti yang tertuang di dalam Paket Kebijakan 6 Mei 1986 tentang peningkatan ekspor komoditi non migas dan pajak, Paket Pebruari 1991 tentang aturan-aturan

perbankan, Undang-undang Perbankan Maret 1992, Pembentukan Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) tahun 1991, Kebijakan Deregulasi Juli 1992 tentang Investasi, Paket deregulasi 27 Juni 1994 mengenai kebebasan kepada penanam modal asing untuk memiliki tanah di Indonesia, serta Paket Deregulasi Mei 1995 tentang penanaman modal dan industri, dan masih banyak lagi kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah, disektor per-pajakan misalnya.

Dalam bentuk kerjasama, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN dan AFTA (Asian Free Trade Area) atau dikenal dengan "kawasan perdagangan bebas Asean", serta Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi bebas untuk negara-negara Asia Pasific, dan Gerakan Non Blok (GNB), serta OPEC, dan masih ada berbagai bentuk kerjasama antara negara, baik bilateral maupun multilateral.

Kesemuanya ini bertujuan pokok untuk menggairahkan kehidupan ekonomi yang lebih sehat dengan memberi arah dan rangsangan kepada kehidupan ekonomi dalam masyarakat juga merangsang kepada penanaman modal baik dalam negeri maupun dari luar negeri terutama yang dapat mendorong dan memperlancar ekspor non migas, agar dapat mengimbangi tekanan-tekanan yang berat dimana dirasakan dalam penerimaan negara/tabungan pemerintah serta penerimaan devisa negara.

5.2. Saran-saran

Dengan melihat hasil keseluruhan penulisan ini maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- Adanya perkembangan perekonomian Internasional dan perekonomian Indonesia dalam dekade tahun-tahun terakhir ini (1996/97), maka untuk pelaksanaan bantuan/pinjaman luar negeri yang dengan bersamaan tabungan pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam negeri, masih belum sejalan dengan apa yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sehingga perlu untuk mengadakan tindakan pengurangan atau penekanan pinjaman luar negeri, agar dana pengeluaran anggaran rutin dapat ditekan serta dana pembiayaan pembangunan dapat bertambah jumlahnya.
- Untuk mengadakan pinjaman luar negeri maka pemerintah selayaknya berpegang pada kebijaksanaan pengendalian hutang-hutang luar negeri dengan berpedoman pada perbandingan pelunasan angsuran dan pembayaran bunga pinjaman terhadap penghasilan devisa negara dari ekspor (migas dan non migas), dengan berkembang pada tingkat yang cukup aman agar dapat menciptakan kondisi stabilisasi perekonomian dalam negeri secara keseluruhan.
- Dengan adanya sikap pemerintah untuk dapat menekan arus pinjaman luar negeri, maka berarti terjadi pula penekanan angka pada debt service ratio (DSR). Oleh karena itu perlu adanya kerja keras untuk menggalakkan peningkatan ekspor non migas di dalam menambah sumber peneri-

maan dalam negeri / tabungan pemerintah, karena dengan jalan tersebut maka terjadi peningkatan pada tabungan pemerintah dan penurunan pada pinjaman luar negeri. Sehingga pinjaman luar negeri tersebut menjadi pelengkap yang sesuai dengan GBHN.

- Sedangkan untuk jalan di dalam mengusahakan penggunaan akan sisa dana pinjaman luar negeri, agar dapat lebih terarah, efisien, dan lebih produktif. Maka lebih mengutamakan penyalurannya diserahkan pada daerah-daerah yang berpotensi akan sumber dayanya.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku - Buku :

Boediono, DR, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis, Yogyakarta; BPEF - UGM, 1982.

_____, Ekonomi Internasional, Seri Sinopsis, Yogyakarta ; BPEF - UGM, 1982.

Burrows, Paul and Hitiris, Theodore, Macro Economic - Theory, a Mathematical Introduction, London, New York, Sidney, Toronto ; Jhon Willey, 1974.

Cahyono, Bambang Try, Ekonomi Indonesia, Beberapa masalah Pokok, Yogyakarta ; Ananda, 1983.

Hasanuddin, Basri, Prof., DR., Bantuan Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi, Ujung Pandang; Lephass, 1994.

Kindle Berger, C.P., Economic Development, Third Edition, Tokyo, 1965.

Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedua, Longmen Inc., New York, AS, 1978. (alih bahasa; Aminuddin dan Mursid)

Sagir, Soeharsono, SE., Ekonomi Indonesia: Gagasan, Polemik dan Pemikiran, Bandung, tahun 1982.

Salvatore D. and Dowling E., Development Economic, Mc. Graw Hill Book Company, 1977.

Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan, Proses masalah dan Dasar Kebijaksanaan, Medan, Borta Gorat, 1978

Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan, Djakarta, 1960

B. Terbitan / Tulisan Ilmiah :

Biro Pusat Statistik, Indikator Ekonomi, beberapa edisi

Prisma, Berbagai Tulisan Ilmiah.

Bank Indonesia, Laporan Tahunan.

Harian Kompas dan Fajar, beberapa tulisan ilmiah.

TABEL : 2.1 REALISASI ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN SERTA TABUNGAN PEMERINTAH
TABLE : 2.1 ACTUAL GOVERNMENT EXPENDITURES AND PUBLIC SAVINGS
(MILIAR/BILLION RUPIAHS)

TAHUN/SEMESTER 1) YEAR/NOTH	Rutin/Routine			Pembangunan/Development			Defisit (-) (5)-(6)
	Penerimaan dalam Negeri Domestic Revenues	Fengeluaran Rutin Routine Expenditures	Tabungan Pemerintah Government Savings	Penerimaan Pembangunan Development Revenues	Fengeluaran Pembangunan Development Expenditures		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1974/1975	1 754	1 016	738	232	962	730	
1979/1980	6 697	4 062	2 635	1 383	4 016	2 633	
1981/1982	12 213	6 978	5 235	1 709	6 940	5 231	
1982/1983	12 418	6 594	5 822	1 940	7 360	5 420	
1983/1984	14 433	8 412	6 021	3 882	9 899	4 017	
1984/1985	15 905	9 429	6 476	3 478	9 952	6 474	
1985/1986	19 253	11 951(2)	7 302(2)	3 572	10 873	7 301	
1986/1987	16 141	13 559	2 582	5 752	8 332	2 580	
1987/1988	20 803	17 481	3 322	6 158	9 477	3 319	
1988/1989	23 004	20 738	2 265	9 991	12 251	2 260	
1989/1990	28 740	24 331	4 409	9 429	13 834	4 405	
1990/1991	39 546	29 998	9 548	9 905	19 452	9 547	
1991/1992	41 565	30 228	11 337	10 409	21 764	11 355	
Semester I	17 097	13 965	3 132	5 064	8 124	3 060	
Semester II	24 468	16 263	8 225	5 345	13 640	8 295	
1992/1993	47 452	38 031	13 421	10 716	24 135	13 419	
Semester I	21 800	15 843	5 951	4 460	9 774	5 314	
Semester II	25 652	18 188	7 464	6 256	14 361	8 105	
1993/1994	52 280	38 799	13 481	10 372	25 661	15 289	
Semester I	23 079	17 895	5 184	4 145	9 326	5 181	
Semester II	29 201	20 904	8 297	6 227	16 335	10 108	
1994/1995	61 370	43 179	18 191	10 983	29 163	18 180	
Semester I	25 769	19 838	5 931	5 111	10 982	5 871	
Semester II	35 601	23 341	12 260	5 872	18 182	12 309	

Catatan : 1) Tahun berakhir Maret,
Sumber : Departemen Keuangan

Note : 1) Year ending March
Source : Department of Finance